



PEMERINTAH
KABUPATEN BANYUMAS

RENCANA KERJA

RENJA 2027

DINAS PERUMAHAN
DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KABUPATEN BANYUMAS

Jl. Gerilya Barat No.5 Tanjung
Purwokerto Selatan
dinperkim.banyumaskab.go.id

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim,

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT, karena atas berkat rahmat dan karunia-Nya, Dokumen Rencana Kerja Tahun 2027 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Banyumas telah tersusun. Dokumen ini disusun sebagai acuan dalam tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, maupun tahap dan evaluasi terkait Program dan kegiatan yang ada di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Banyumas.

Rencana Kerja Tahun 2027 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Banyumas memiliki fungsi fundamental dalam sistem perencanaan daerah, karena Renja merupakan produk perencanaan pada unit organisasi pemerintah terendah dan terkecil yang akan dilaksanakan pada satu tahun ke depan. Renja Tahun 2027 adalah sebagai acuan dalam melaksanakan program dan kegiatan pada tahun anggaran 2027, yang dituangkan ke dalam tujuan, sasaran, program dan kegiatan.

Dokumen Rencana Kerja Tahun 2027 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Banyumas ini dapat tersusun berkat bantuan, arahan, dan dukungan dari berbagai pihak, baik secara individu maupun kelompok. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kontribusi tersebut. Kami menyadari bahwa dokumen ini belum sempurna, baik dari isi maupun penulisannya, sehingga kami sangat mengharapkan masukan untuk perbaikan ke depannya. Semoga dokumen ini bermanfaat bagi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman pada khususnya dan masyarakat Kabupaten Banyumas pada umumnya.

Purwokerto, Januari 2026

Kepala Dinas Perumahan Dan
Kawasan Permukiman
Kabupaten Banyumas



Sakty Suprabowo, S.T.
Pembina Utama Muda (IVc)
NIP 196911231997031001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	iii
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
I.1. LATAR BELAKANG.....	1
I.2. LANDASAN HUKUM.....	2
I.3. MAKSUD DAN TUJUAN	6
I.4. SISTEMATIKA	6
BAB II	10
HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU.....	10
II.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH	10
A Penetapan Indikator Kinerja	10
B Capaian Analisis Kinerja	10
II.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH.....	29
A Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi.....	29
II.3. ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH.....	32
II.4. REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RENJA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN BANYUMAS	37
II.5. PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT ...	46
II.6. INOVASI PERANGKAT DAERAH.....	48
BAB III	49
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH.....	49
III.1. TELAHAAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL	49
III.2. TUJUAN DAN SASARAN RENJA PERANGKAT DAERAH.....	52
III.3. PROGRAM DAN KEGIATAN.....	53
BAB IV	63
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH.....	63
BAB V.....	72
PENUTUP	72

BAB I

PENDAHULUAN

I.1. LATAR BELAKANG

Dengan ditetapkannya Undang-Undang No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), diamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan, dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah maupun perencanaan tahunan. Untuk setiap daerah (kabupaten/kota) harus menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Sementara itu paralel dengan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sesuai dengan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 juga mewajibkan setiap Perangkat Daerah menyusun dan memiliki Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah, yang disusun dengan berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah dan mengacu pada RKPD. Sedangkan RKPD dijadikan dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Banyumas yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan tahunan, penyusunannya dengan memperhatikan seluruh aspirasi pemangku kepentingan pembangunan melalui penyelenggaraan Musrenbang tahunan yang diselenggarakan secara berjenjang untuk keterpaduan Rancangan Renja Perangkat Daerah.

Sesuai amanat tersebut maka Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Banyumas sebagai Organisasi Perangkat Daerah menyusun Rencana Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Banyumas Tahun 2027. Renja merupakan dokumen rencana pembangunan perangkat daerah yang berjangka waktu 1 (satu) tahun guna mengoperasionalkan RKPD yang disertai dengan upaya mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja

pelayanan masyarakat yang sudah dicapai sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dalam Pasal 2 yang berbunyi Ruang lingkup perencanaan pembangunan daerah meliputi tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah terdiri atas RPJPD, RPJMD, Renstra SKPD, RKPD dan RENJA Perangkat Daerah.

Berhasil dan tidaknya target yang telah ditentukan dalam Renja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman tidak terlepas dari integritas moral dan kerjasama dari semua pihak, termasuk peran serta masyarakat. Renja yang telah tersusun ini diharapkan dapat menjadi pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2027 untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Selain itu juga dapat berguna bagi peningkatan kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Banyumas.

I.2. LANDASAN HUKUM

Dasar hukum penyusunan Rencana Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Banyumas Tahun 2027 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
4. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2024 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 8914);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
 6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
 7. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
13. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2027 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 435);
19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 6);

20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2044 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 8);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 10 tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banyumas tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2011 Nomor 3);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 16) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 8 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2025 Nomor 8);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 11 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2024 Nomor 11);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 3 Tahun 2025 mengatur tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2025 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 103);
25. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 34 Tahun 2025 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2025 Nomor 35);
26. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 89 Tahun 2025 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2025 Nomor 90).

I.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan Rencana Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Banyumas tahun 2027 adalah sebagai berikut:

1. Menentukan program dan kegiatan pembangunan daerah tahun 2027 yang menjadi tolok ukur penilaian kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Banyumas dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.
2. Mewujudkan sinergitas rencana program dan kegiatan prioritas dengan arah kebijakan pembangunan daerah tahun 2027.

Sedangkan tujuan penyusunan Rencana Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Banyumas tahun 2027 adalah sebagai berikut:

1. Sebagai pedoman Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Banyumas dalam mengimplementasikan RPJMD Kabupaten Banyumas Tahun 2025-2029 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka mendukung visi dan misi Pemerintah Kabupaten Banyumas.
2. Merumuskan keterkaitan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan program kegiatan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Banyumas selama tahun 2027.

I.4. SISTEMATIKA

BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah sehingga substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Perangkat Daerah, proses penyusunan Renja Perangkat Daerah, keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah dengan dokumen RKPD, Renstra Perangkat Daerah, dengan Renja K/L dan Renja provinsi/kabupaten/kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya

yang menagtur tentang SOTK, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Perangkat Daerah.

1.4. Sistematika

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya. Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan realisasi Renstra Perangkat Daerah mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Perangkat Daerah dan/atau realisasi APBD.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai Peraturan Pemerintah No 6 Tahun 2008. Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Berisikan uraian mengenai sejauh mana tingkat kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Perangkat Daerah, permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas fungsi Perangkat Daerah dan dampaknya terhadap capaian program, tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah, serta formulasi

isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

menguraikan proses yang dilakukan dengan membandingkan rancangan awal RKPD dan analisis kebutuhan, penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan serta penjelasan terhadap perbedaan dengan Rancangan awal RKPD.

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang langsung ditujukan kepada Perangkat Daerah maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi Perangkat Daerah dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan Musrenbang.

2.6. Inovasi Perangkat Daerah

Bagian ini memuat uraian mengenai berbagai bentuk inovasi yang telah, sedang, atau direncanakan oleh Perangkat Daerah dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik, efektivitas pelaksanaan program/kegiatan, serta efisiensi penggunaan sumber daya.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Bagian ini memuat penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Bagian ini memuat perumusan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah yang didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah.

3.3. Program dan kegiatan

Berisikan penjelasan mengenai faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan, rekapitulasi program dan kegiatan serta penjelasan jika rumusan

program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Bagian ini menguraikan secara detail Rencana Kerja dan pendanaan Perangkat Daerah Tahun 2027.

BAB V PENUTUP

Menguraikan catatan penting yang perlu mendapat perhatian dalam pelaksanaan kegiatan, termasuk apabila ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, serta menjelaskan kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut yang akan dilakukan.

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

II.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH

Rencana Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Banyumas disusun sebagai penjabaran perencanaan tahunan dari Rencana Strategis Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman. Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan-kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah. Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggung jawaban yang dilaksanakan secara periodik. Terkait dengan hal tersebut Rencana Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Banyumas ini menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran dari hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Banyumas selama tahun 2025 dan perkiraan target tahun 2027. Pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran melalui tahapan sebagai berikut:

A Penetapan Indikator Kinerja

Penetapan indikator kinerja merupakan ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja kegiatan meliputi indikator masukan (*input*), keluaran (*output*), hasil (*outcome*), manfaat (*benefit*) dan dampak (*impact*). Indikator-indikator tersebut dapat berupa dana, sumber daya manusia, laporan, buku dan indikator lainnya. Penetapan indikator kinerja ini diikuti dengan penetapan besaran indikator kinerja untuk masing-masing jenis indikator yang telah ditetapkan.

B Capaian Analisis Kinerja

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja kegiatan. Pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja. Analisis Kinerja dilakukan dengan melakukan monitoring dan evaluasi program pada setiap tahunnya. Pelaksanaan program dan

kegiatan dalam mewujudkan target kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2025 dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2025. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Banyumas pada Tahun 2025 menganggarkan Belanja Operasi sebesar Rp.45.898.398.891,00 Sedangkan untuk anggaran Belanja Modal Tahun 2025 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp.13.306.814.410,00 dengan jumlah keseluruhan Rp 59.205.213.301,00 dan pada akhir tahun anggaran 2025 capaian realisasi sebesar Rp.57.792.271.814 atau sebesar 97.65%.

Gambaran keberhasilan capaian tujuan dan sasaran dalam rangka mewujudkan visi dan misi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Banyumas direpresentasikan oleh capaian indikator kinerja. Rekapitulasi evaluasi hasil kinerja tahun lalu dapat dilihat dalam tabel 2.1 dan TC-29 sebagai berikut:

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan dan Sub Kegiatan (Output)	Satuan	Realisasi Renstra s/d Tahun 2025	Target dan Realisasi Kinerja Program Kegiatan Sub Kegiatan (n-2) Tahun 2025						Keterangan
				Target Renja Perangkat Daerah (Renja Perubahan)	Pagu DPA	Realisasi Kinerja Renja PD	Realisasi Anggaran	Capaian Kinerja Renja Perangkat Daerah (%)	Capaian Anggaran (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9=7/5	10=8/6	11
[1] Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur perumahan dan kawasan permukiman sebagai penunjang kesejahteraan masyarakat	Persentase peningkatan Lingkungan Permukiman yang Layak Huni	%	0.22	0.157		0.22		140.13		Realisasi permukiman layak huni 2025 = 80,37 Realisasi permukiman layak huni 2024 = 80,15 Peningkatan 0,22%
[2] Meningkatnya ketersediaan dan kualitas infrastruktur perumahan dan kawasan permukiman	Persentase peningkatan Lingkungan Permukiman yang Layak Huni	%	0.22	0.157		0.22		140.13		Realisasi permukiman layak huni 2025 = 80,37 Realisasi permukiman layak huni 2024 = 80,15 Peningkatan 0,22%
[3] PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Presentase Peningkatan Drainase lingkungan dalam Kondisi Baik	%	1.62	0.77	3.321.609.970	1.62	3.294.459.500	210.39	99,18%	Realisasi tahun 2025 = 44,05 % Realisasi tahun 2024 = 42,43 Peningkatan sebesar = 1,62%
[4] Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Presentase Drainase Lingkungan dalam kondisi baik	%	44.05	42.83	3.321.609.970	44.05	3.294.459.500	102.85	99%	Total drainase terbangun / total panjang drainase = 143,16 Km / 325 km = 44,05 %
[5] Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Dibangun	M	4450.23	2499	3.321.609.970	4450.23	3.294.459.500	178.08	99%	Paket pekerjaan yang telah selesai yaitu sebanyak 36 paket pekerjaan.
[3] PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan yang ditangani	%	60.98	56.11	130.000.000	60.98	120.000.000	108.68	92%	Target tersebut adalah menyelesaikan target SK Kawasan Kumuh seluas 115,67 Ha Realisasi berdasarkan berita acara pengurangan kawasan kumuh tahun 2025 Pengurangan kawasan kumuh telah mencapai 70,54 / 115.67 = 60,98% dan pada bulan November 2025 telah muncul SK Kawasan Permukiman Kumuh terbaru dengan luasan 47,508 Ha dan berita acara pengurangan luasan kumuh sebesar 2,378 Ha

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan dan Sub Kegiatan (Output)	Satuan	Realisasi Renstra s/d Tahun 2025	Target dan Realisasi Kinerja Program Kegiatan Sub Kegiatan (n-2) Tahun 2025						Keterangan
				Target Renja Perangkat Daerah (Renja Perubahan)	Pagu DPA	Realisasi Kinerja Renja PD	Realisasi Anggaran	Capaian Kinerja Renja Perangkat Daerah (%)	Capaian Anggaran (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9=7/5	10=8/6	11
										sehingga angka kumuh Riil pada kondisi akhir 2025 sebesar 45,13 Ha
[4] Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Jumlah Kawasan Kumuh yang ditingkatkan	Lokasi	8	5	10.000.000	8	10.000.000	160	100%	Total 7 Kelurahan meliputi 8 lokasi. Yang berkurang kumuhnya di 2 kelurahan yaitu: 1. Kel. Pwt Kulon RT 001 RW 003 2. Kel. Sumampir RT 006 RW 003 Dan yang tidak berkurang kumuhnya di 5 kelurahan meliputi 6 lokasi.
[5] Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni Serta Kesadaran Hukum Tentang Kepemilikan Rumah	Jumlah Rumah Tangga yang Terfasilitasi Peningkatan Kesadaran dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Rumah Tangga	74	50	10.000.000	74	10.000.000	148	100%	Kegiatan sudah di laksanakan.
[4] Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Jumlah Kawasan Kumuh yang ditingkatkan	Lokasi	8	5	120.000.000	8	110.000.000	160	92%	Total 7 Kelurahan meliputi 8 lokasi. Yang berkurang kumuhnya di 2 kelurahan yaitu: 1. Kel. Pwt Kulon RT 001 RW 003 2. Kel. Sumampir RT 006 RW 003 Dan yang tidak berkurang kumuhnya di 5 kelurahan meliputi 6 lokasi.
[5] Pendataan dan Verifikasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Kumuh	Jumlah Dokumen Data Permukiman Kumuh yang Terverifikasi	Dokumen	1	1	120.000.000	1	110.000.000	100	92%	Pembayaran belanja jasa tenaga ahli baru di SPJ kan sampai dengan bulan November.
[3] PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Prosentase PSU Perumahan yang diserahkan ke Pemerintah Daerah	%	47.19	40	10.289.387.230	47.19	10.184.345.110	117.97	99%	BAST sampai dengan tahun 2025 sebanyak 143 Psu / total seluruh 303 perumahan = 47,19%
	Rasio Permukiman Layak Huni	%	80.37	80.34		80.37		100.04		"Sisa kumuh eksisting dari SK lama = 51,58 Ha Sk baru 2025 = 47,508 Berita acara pengurangan kumuh = 2,378 Ha Kumuh Existing 2025 = 45,13 Ha Sehingga dianggap ada pengurangan 6,45 Ha" Sehingga

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan dan Sub Kegiatan (Output)	Satuan	Realisasi Renstra s/d Tahun 2025	Target dan Realisasi Kinerja Program Kegiatan Sub Kegiatan (n-2) Tahun 2025						Keterangan
				Target Renja Perangkat Daerah (Renja Perubahan)	Pagu DPA	Realisasi Kinerja Renja PD	Realisasi Anggaran	Capaian Kinerja Renja Perangkat Daerah (%)	Capaian Anggaran (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9=7/5	10=8/6	11
										perhitungan menjadi Luas Permukiman Layak Huni (proyeksi) dibagi Luas Wilayah Permukiman Luas 2024 + luas 2025 / luas wilayah permukiman (15266+6,45 / 19047) * 100 = 80,37
[4] Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Jumlah PSU Perumahan yang diserahkan	Dokumen	43	20	10.289.387.230	43	10.184.345.110	215	99%	total BAST tahun 2025 = 43 BAST 1 = 23 BAST 2 = 20
	Jumlah PSU yang ditingkatkan	Unit	96	50		96		192	#DIV/0!	Jumlah lokasi ditangani = 96 Lokasi
[5] Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	Dokumen	20	10	6.250.000	20	4.087.000	200	65%	Sudah 20 Siteplan disahkan per tanggal 3 Desember 2025.
[5] Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	Laporan	26	10	47.437.500	26	40.114.000	260	85%	Rapat Tim Verif 6 perum (Maret); Desk BAST Admin. 19 perum (6+13). Tambahan rapat koordinasi dengan BPN 1x di Tw 4.
[5] Verifikasi dan Penyerahan PSU Perumahan dari Pengembang	Jumlah Laporan Hasil Serah Terima PSU Perumahan yang Terverifikasi dari Pengembang	Laporan	43	10	20.000.000	43	18.293.200	430	91%	Sebanyak 1 BAST Fisik (Februari); 6 BAST Adm. (Juli); 13 BAST Adm. (September); 16 BAST Fisik (September). Dan tambahan di Tw 4 ada 3 BAST fisik dan 4 BAST admin.
[5] Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian	Lokasi	96	80	10.215.699.730	96	10.121.850.910	120	99%	Total sudah 96 lokasi paket pekerjaan di Tahun 2025 yang terdiri dari kegiatan penanganan jalan, pembagunan talud dan pembangunan sarpras makam.
[3] PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Presentase tersedianya rumah layak huni bagi warga terdampak relokasi akibat program pemerintah	%		100	572.333.332	N/A	550.860.062	N/A	96%	
	Prosentase tersedianya rumah layak huni bagi korban bencana	%	100	100		100		100		Rehab dari target : 3 terbangun 3 pembangunan dari target 11 terbangun 11 total target 17

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan dan Sub Kegiatan (Output)	Satuan	Realisasi Renstra s/d Tahun 2025	Target dan Realisasi Kinerja Program Kegiatan Sub Kegiatan (n-2) Tahun 2025						Keterangan
				Target Renja Perangkat Daerah (Renja Perubahan)	Pagu DPA	Realisasi Kinerja Renja PD	Realisasi Anggaran	Capaian Kinerja Renja Perangkat Daerah (%)	Capaian Anggaran (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9=7/5	10=8/6	11
										target perubahan 14 realisasi 14 swadaya 3 100%
[4] Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Dokumen	2	2	86.203.700	2	66.764.700	100	77%	
[5] Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Bakal Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terverifikasi	Dokumen	1	1	42.844.200	1	35.881.700	100	84%	Dokumen sedang disusun.
[5] Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Dokumen	1	1	43.359.500	1	30.883.000	100	71%	Sedang pelaksanaan pendataan identifikasi perumahan di lapangan dengan locus di wilayah Desa Watuagung.
[4] Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Keg	2	2	32.949.216	2	31.374.216	100	95%	Total kegiatan sosialisasi = 2 Kegiatan
[5] Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana	Jumlah Orang/Sukarelawan yang Mengikuti Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota	Orang	51	44	3.000.000	51	1.425.000	115.91	48%	Sosialisasi bimtek rumah korban bencana.
[5] Pembentukan dan Pelatihan Tim Satgas, Tim Pendamping dan Fasilitator	Jumlah Orang pada Tim Satgas, Tim Pendamping, dan Fasilitator yang Terbentuk dan Terlatih	Orang	2	2	29.949.216	2	29.949.216	100	100%	1 orang TFL Penanganan Rumah Bencana.
[4] Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah rumah korban bencana yang dibangun dan direhabilitasi	Unit	17	17	430.000.000	17	430.000.000	100	100%	Pelaksanaan tahun 2025 A. Anggaran induk: 1. Rehabilitasi : 3 unit (kedungbanteng, klinting, watuagung) @15 jt 2. Pembangunan Kembali: 2 unit (kemiri, karangklesem-pekuncen) @35 jt 3. Pemukiman

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan dan Sub Kegiatan (Output)	Satuan	Realisasi Renstra s/d Tahun 2025	Target dan Realisasi Kinerja Program Kegiatan Sub Kegiatan (n-2) Tahun 2025						Keterangan
				Target Renja Perangkat Daerah (Renja Perubahan)	Pagu DPA	Realisasi Kinerja Renja PD	Realisasi Anggaran	Capaian Kinerja Renja Perangkat Daerah (%)	Capaian Anggaran (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9=7/5	10=8/6	11
										kembali/relokasi: 2 unit (ketanda, watuagung) @35 jt 4. BTT mekanisme Pemukiman Kembali 1 unit (Sidabowa) @35 jt B. Perubahan anggaran 1. Pembangunan kembali: 1 unit (pengadegan) @35 jt 2. Pemukiman kembali: 5 unit (parungkamal, watuagung 2 unit, darmakradenan, krackak) @35 jt
[5] Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/ Kota yang Terehabilitasi	Unit Rumah	5	5	45.000.000	5	45.000.000	100	100%	Tidak ada tambahan kegiatan.
[5] Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/ Kota yang Terbangun	Unit Rumah	11	12	385.000.000	11	385.000.000	91.67	100%	Tidak ada tambahan kegiatan.
[4] Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan serah terima rumah terdampak bencana dan relokasi akibat program pemerintah	Keg	14	17	23.180.416	14	22.721.146	82.35	98%	Serah terima rumah bencana yang ditangani pemda sebanyak 14 rumah Swadaya 3 Rumah
[5] Penatausahaan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/ Kota	Dokumen	1	1	23.180.416	1	22.721.146	100	98%	Penyusunan Dokumen sudah selesai di Tw 4.
[3] PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Pelayanan Publik Perangkat Daerah	%	2.84	3.51	9.679.368.965	2.84	9.227.504.144	80.91	95%	
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Angka	86.35	87		86.35		99.25		Terdapat kenaikan nilai SAKIP dari tahun sebelumnya
	Nilai SPIP Perangkat Daerah	Nilai	3.805	3.4		3.805		111.91		terdapat kenaikan dari nilai tahun sbelumnya
	Presentase pemenuhan layanan penunjang urusan perangkat daerah	%	100	100		100		100		
[4] Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Dokumen	7	7	40.987.750	7	38.167.360	100	93%	1. DOKUMEN RTP 2. DOKUMEN LKJP 3. DOKUMEN SAKIP 4. DOKUMEN RENJA PERUBAHAN 2025 5. DOKUMEN RENSTRA 6.

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan dan Sub Kegiatan (Output)	Satuan	Realisasi Renstra s/d Tahun 2025	Target dan Realisasi Kinerja Program Kegiatan Sub Kegiatan (n-2) Tahun 2025						Keterangan
				Target Renja Perangkat Daerah (Renja Perubahan)	Pagu DPA	Realisasi Kinerja Renja PD	Realisasi Anggaran	Capaian Kinerja Renja Perangkat Daerah (%)	Capaian Anggaran (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9=7/5	10=8/6	11
										DOKUMEN REVIU RTP 7. DOKUMEN PK PERUBAHAN
[5] Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	6	4	4.226.500	6	2.698.860	150	64%	Renja Perubahan 2025 Ranwal Renstra 2025-2029 Reviu RTP Strategis dan Operasional 2025 RTP Strategis dan Operasional 2026.
[5] Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	3	3	36.761.250	3	35.468.500	100	96%	Form LPPD, LKjIP, Evaluasi RTP Operasional Tw 3 2025.
[4] Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan perangkat daerah	Laporan	12	12	6.707.618.216	12	6.372.078.133	100	95%	Laporan bulanan
[5] Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	46	48	6.491.068.216	46	6.158.078.133	95.83	95%	Jumlah PNS 40 dan PPPK (lama) 6 kerana PPPK (baru) gaji masih di BKPSDM.
[5] Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	24	24	216.550.000	24	214.000.000	100	99%	Honor Pengelola Keuangan dan Pejabat Pengadaan Realisasi rutin per bulan s/d November.
[4] Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum perangkat daerah	Laporan	60	60	380.916.700	60	342.342.163	100	90%	Laporan bulanan
[5] Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	1	7.422.000	1	7.184.440	100	97%	Belanja lampu, kabel, dan lainnya sudah selesai.
[5] Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	1	1	174.514.000	1	149.918.291	100	86%	Belanja BBM, minuman harian rutin per bulan. Belanja ATK dan lainnya sudah realisasi.
[5] Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	1	22.050.000	1	22.031.350	100	100%	Tagihan belanja fotocopy rutin per bulan.
[5] Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	30	38	165.605.700	30	152.087.082	78.95	92%	Belanja makan minum rapat, DL, DD menyesuaikan jadwal kegiatan.
[5] Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	3000	4000	11.325.000	3000	11.121.000	75	98%	Penyusunan berkas arsip sudah mulai di laksanakan.

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan dan Sub Kegiatan (Output)	Satuan	Realisasi Renstra s/d Tahun 2025	Target dan Realisasi Kinerja Program Kegiatan Sub Kegiatan (n-2) Tahun 2025						Keterangan
				Target Renja Perangkat Daerah (Renja Perubahan)	Pagu DPA	Realisasi Kinerja Renja PD	Realisasi Anggaran	Capaian Kinerja Renja Perangkat Daerah (%)	Capaian Anggaran (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9=7/5	10=8/6	11
[4] Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah laporan pelaksanaan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Laporan	2	2	173.879.000	2	162.813.577	100	94%	Laporan Pengadaan Mebel Laporan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
[5] Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	4	4	2.200.000	4	2.199.576	100	100%	Sudah realisasi untuk pembelian Kursi rapat stainless.
[5] Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	8	8	171.679.000	8	160.614.001	100	94%	Proses pengadaan sudah selesai.
[4] Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan pelaksanaan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Laporan	2	2	2.039.363.200	2	1.980.333.591	100	97%	Laporan Pembayaran penyediaan jasa penunjang
[5] Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	60	60	143.730.000	60	136.448.741	100	95%	Belanja tagihan telepon, air, listrik, internet dan lainnya rutin tiap bulan.
[5] Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	12	1.895.633.200	12	1.843.884.850	100	97%	Upah tenaga Non ASN, BPJS, Asuransi JKK, JKM rutin tiap bulan s/d November.
[4] Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan pelaksanaan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Laporan	4	4	336.604.099	4	331.769.320	100	99%	Lap .Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Lap. Pemeliharaan Mebel Lap. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Lap. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya (belum terlaksana)
[5] Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	34	34	194.760.000	34	192.515.520	100	99%	Pemeliharaan kendaraan dinas rutin.
[5] Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	1	1	2.250.000	1	2.250.000	100	100%	Sudah realisasi di Tw 2.

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan dan Sub Kegiatan (Output)	Satuan	Realisasi Renstra s/d Tahun 2025	Target dan Realisasi Kinerja Program Kegiatan Sub Kegiatan (n-2) Tahun 2025						Keterangan
				Target Renja Perangkat Daerah (Renja Perubahan)	Pagu DPA	Realisasi Kinerja Renja PD	Realisasi Anggaran	Capaian Kinerja Renja Perangkat Daerah (%)	Capaian Anggaran (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9=7/5	10=8/6	11
[5] Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	55	55	66.490.000	55	64.776.800	100	97%	Pemeliharaan komputer, printer , AC dan lainnya rutin.
[5] Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Unit	1	1	73.104.099	1	72.227.000	100	99%	Pembayaran masih dalam proses.
[2] Tersedianya rumah layak huni	Rasio rumah layak huni bagi masyarakat miskin	Rasio	1	0.8738		1		114.44		Indikator tersebut sudah tidak relevan karena penyelesaian PKE sudah selesai di tahun 2024 100%
[3] PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Presentase peningkatan RTLH yang diperbaiki	%	29.29	11.90	8.159.966.762	29.29	7.863.597.641	246.13	96%	Indikator sudah tidak relevan, dan perhitungan indikator ini pada RPD 2024 hanya untuk menghitung RTLH PKE yang sudah selesai dituntaskan di 2024
[4] Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	Presentase RTLH yang diperbaiki	%	100	87.38	8.159.966.762	100	7.863.597.641	114.44	96%	Indikator sudah tidak relevan, dan perhitungan indikator ini pada RPD 2024 hanya untuk menghitung RTLH PKE yang sudah selesai dituntaskan di 2024
[5] Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki	Unit Rumah	503	494	8.159.966.762	503	7.863.597.641	101.82	96%	Pencairan tahap 2 sebanyak 278 unit, sehingga total realisasi 503 unit.
[1] Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Penataan Ruang	Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang	%	100	100		100		100		
[2] Meningkatnya Kesesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang	Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang	%	100	100		100		100		Kesesuaian pemanfaatan ruang dan rencana tata ruang 100%

Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan dan Sub Kegiatan (Output)	Satuan	Realisasi Renstra s/d Tahun 2025	Target dan Realisasi Kinerja Program Kegiatan Sub Kegiatan (n-2) Tahun 2025						Keterangan
				Target Renja Perangkat Daerah (Renja Perubahan)	Pagu DPA	Realisasi Kinerja Renja PD	Realisasi Anggaran	Capaian Kinerja Renja Perangkat Daerah (%)	Capaian Anggaran (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9=7/5	10=8/6	11
[3] PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Presentase rata rata capaian kinerja penyelenggaraan penataan ruang	%	100	100	791.700.000	100	667.293.040	100	84%	Pelayanan tata ruang sesuai dengan rencana tata ruang
[4] Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten Kota yang ditetapkan	Dokumen	1	1	129.250.000	1	85.825.155	100	66%	RTRW sudah ditetapkan
[5] Pelaksanaan Persetujuan Substansi RDTR Kabupaten/Kota	Jumlah surat persetujuan substansi RDTR Kabupaten/ Kota	Dokumen		2	129.250.000	0	85.825.155	0	66%	Menunggu jadwal lintas sektor dari Kementerian ATR/ BPN. Ternyata Linseknnya di undur menjadi tahun 2026 karna harus ada agenda asistensi lagi (RDTR KP WANGON & AJB). Potensi SILPA sekitar 60jt.
[4] Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen rencana tata ruang yang disusun	Dokumen	1	1	440.950.000	1	369.469.485	100	84%	Peta Dasar Revisi RDTR Purwokerto Dokumen Matek Revisi RDTR Pwt
[5] Penyusunan Peta Dasar	Jumlah data SHP Peta Dasar	peta	1	1	130.000.000	1	128.480.545	100	99%	Sudah selesai kontrak per tanggal 25 April 2025.
[5] Penyusunan RDTR Kabupaten/Kota	Jumlah materi teknis dan ranperkada RDTR Kabupaten/ Kota	Dokumen	1	1	310.950.000	1	240.988.940	100	78%	Jasa Konsultasi Penyusunan Revisi RDTR KP Purwokerto.
[4] Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penerbitan KKPR Non - Berusaha dan Validasi pernyataan mandiri tata ruang	Dokumen	7424	780	120.000.000	7424	110.993.400	951.79	92%	KKPR Non Berusaha + Validasi Mandiri ditambahkan dengan sistem OSS = 7424 pemohon
[5] Pelaksanaan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang	Jumlah layanan Persetujuan KKPR sesuai dengan ketentuan waktu yang berlaku	Layanan	1118	240	120.000.000	1118	110.993.400	465.83	92%	Jasa Konsultasi SPPR sudah selesai.
[4] Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan pengendalian yang dilaksanakan	Keg	245	60	101.500.000	245	101.005.000	408.33	100%	Jumlah kegiatan Pengendalian sampai dengan bulan Desember = 232 Kegiatan
[5] Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Dokumen	1	1	101.500.000	1	101.005.000	100	100%	Dokumen Penilaian Perwujudan RDTR KP PWT sudah selesai.

Ururan/Bidang Ururan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan dan Sub Kegiatan (Output)	Satuan	Realisasi Renstra s/d Tahun 2025	Target dan Realisasi Kinerja Program Kegiatan Sub Kegiatan (n-2) Tahun 2025						Keterangan
				Target Renja Perangkat Daerah (Renja Perubahan)	Pagu DPA	Realisasi Kinerja Renja PD	Realisasi Anggaran	Capaian Kinerja Renja Perangkat Daerah (%)	Capaian Anggaran (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9=7/5	10=8/6	11
[2] Meningkatnya fasilitas pemanfaatan penggunaan tanah	Persentase pemanfaatan penggunaan tanah	%	100	100		100		100		Persentase pemanfaatan penggunaan tanah 100%
[3] PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	Persentase tanah yang tertata	%	100	100	284.468.950	100	251.228.940	100	88%	Kegatan pertanahan sesuai dengan target
[4] Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen perencanaan penggunaan tanah	Dokumen	13	13	284.468.950	13	251.228.940	100	88%	Laporan Bulanan IPPPT
[5] Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/ Kota	Laporan	12	12	71.080.750	12	51.178.400	100	72%	Sejak diterbitkan RTRW sudah tidak ada lagi IPPPT, untuk realisasi anggaran untuk makan minum rapat.
[5] Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kewenangan Kabupaten/ Kota	Dokumen	1	1	213.388.200	1	200.050.540	100	94%	Penyampaian dan sosialisasi hasil desain stakeout dengan warga; Pengukuran hasil stake out desain konsolidasi tanah dengan warga; makan minum rapat; banner dan materai; perjalanan dinas dalam daerah; belanja patok; rapat evaluasi kegiatan konsolidasi tanah; honorarium tim Konsolidasi Tanah.
[3] PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE	Prosentase tanah yang terfasilitasi redistribusi	%	100	100	16.095.000	100	4.164.000	100	26%	output redistribusi sama dengan Konsolidasi Tanah
[4] Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah lokasi objek redistribusi tanah	Lokasi	1	1	16.095.000	1	4.164.000	100	26%	
[5] Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam Pemanfaatan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam	Dokumen	1	1	16.095.000	1	4.164.000	100	26%	Isinya sebenarnya sertipikat tapi gabisa dipatok bisa berapa, karna sifatnya kan fasilitator programnya BPN. Jadi

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan dan Sub Kegiatan (Output)	Satuan	Realisasi Renstra s/d Tahun 2025	Target dan Realisasi Kinerja Program Kegiatan Sub Kegiatan (n-2) Tahun 2025						Keterangan
				Target Renja Perangkat Daerah (Renja Perubahan)	Pagu DPA	Realisasi Kinerja Renja PD	Realisasi Anggaran	Capaian Kinerja Renja Perangkat Daerah (%)	Capaian Anggaran (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9=7/5	10=8/6	11
Redistribusi Tanah dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Pemanfaatan Redistribusi Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/ Kota									Dinperkim jadi sekretariatnya. Kalo bidang yang mau di sertipikatkan kan tetep lintas instansi baik horizontal atau vertikal. Jadi untuk saat ini masih di KLHK, jadi masih belum bisa gerak.
[3] PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	Prosentase penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah	%		1	787.500	N/A		N/A	0%	Kegiatan dipindah ke Konsolidasi Tanah
[4] Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Calon Penerima Ganti Kerugian dan Santunan Tanah	Orang		20	787.500	N/A		N/A	0%	
[5] Penetapan Daftar Masyarakat Penerima Santunan Tanah dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Keputusan Bupati/ Wali Kota Tentang Penetapan Penerima Santunan Tanah	Dokumen		1	412.500	N/A		N/A	0%	
[5] Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Dokumen		1	375.000	N/A		N/A	0%	
[1] Meningkatnya akses masyarakat terhadap pelayanan dasar yang berkualitas	Prosentase Peningkatan Rumah Tangga dengan Akses Air Limbah Domestik	%	0.97	2		0.97		48.5		capaian tahun 2025 = 94,21 capaian tahun 2024 = 93.24 peningkatan = 94,21 - 93,24 = 0,97
	Prosentase Peningkatan Rumah Tangga dengan Akses Air Minum	%	1.97	1.5		1.97		131.33	#DIV/0!	Capaian 2025 = 81,48 capaian 2024 = 79,51 81,48 - 79,51 = 1.97
[2] Meningkatnya akses infrastruktur pelayanan dasar Air Minum yang berkualitas	Prosentase Peningkatan Rumah Tangga dengan Akses Air Minum	%	1.97	1.5		1.97		131.33		Capaian 2025 = 81,48 capaian 2024 = 79,51 81,48 - 79,51 = 1.97

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan dan Sub Kegiatan (Output)	Satuan	Realisasi Renstra s/d Tahun 2025	Target dan Realisasi Kinerja Program Kegiatan Sub Kegiatan (n-2) Tahun 2025						Keterangan
				Target Renja Perangkat Daerah (Renja Perubahan)	Pagu DPA	Realisasi Kinerja Renja PD	Realisasi Anggaran	Capaian Kinerja Renja Perangkat Daerah (%)	Capaian Anggaran (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9=7/5	10=8/6	11
[3] PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	<i>Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan permukaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh Kab Kota</i>	%	81.48	80,73	11.940.337.492	81.48	11.801.657.195	101.85	99%	Capaian air minum layak berdasarkan berita acara kesepakatan, Jumat 12 Desember 2025 antara Bappedalitbang, Dinperkim, PDAM dan Dinkes sebesar 81,48%
[4] Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	<i>Jumlah lokasi penanganan sistem pengelolaan air minum</i>	Lokasi	32	30	11.940.337.492	32	11.801.657.195	106.67	99%	Peningkatan SPAM Desa Ciberem Kec. Sumbang Peningkatan SPAM Dusun 2 Desa Rempoah Kec. Baturraden Peningkatan SPAM Kadus 5 Desa Kaliori Kec. Kalibagor Pembangunan SPAM Desa Banteran, Kec. Wangon Pembangunan SPAM Desa Besuki Kec. Lumbrir Pembangunan SPAM Desa Cihonje Kec. Gumelar Pembangunan SPAM Desa Cilangkap Kec. Gumelar Pembangunan SPAM Desa Cingebul Kec. Lumbrir Pembangunan SPAM Desa Dermaji Kec. Lumbrir Pembangunan SPAM Desa Gancang Kec. Gumelar Pembangunan SPAM Desa Jatisaba Kec. Cilongok Pembangunan SPAM Desa Jurangbahas Kec. Wangon Pembangunan SPAM Desa Kalitapen Kec. Purwojati Pembangunan SPAM Desa Kaliurip Kec. Purwojati Pembangunan SPAM Desa Kediri Kec. Karanglewas Pembangunan SPAM Desa Kemiri Kec. Sumpiuh Pembangunan SPAM Desa Langgongsari Kec. Cilongok Pembangunan SPAM Desa Nusadadi Kec. Sumpiuh

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan dan Sub Kegiatan (Output)	Satuan	Realisasi Renstra s/d Tahun 2025	Target dan Realisasi Kinerja Program Kegiatan Sub Kegiatan (n-2) Tahun 2025						Keterangan
				Target Renja Perangkat Daerah (Renja Perubahan)	Pagu DPA	Realisasi Kinerja Renja PD	Realisasi Anggaran	Capaian Kinerja Renja Perangkat Daerah (%)	Capaian Anggaran (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9=7/5	10=8/6	11
										Pembangunan SPAM Desa Paningkaban Kec. Gumelar Pembangunan SPAM Desa Panusupan Kec. Cilongok Pembangunan SPAM Desa Pengadegan Kec. Wangon Pembangunan SPAM Desa Randegan Kec. Wangon Pembangunan SPAM Desa Sudimara Kec. Cilongok Pembangunan SPAM Desa Tlaga Kec. Gumelar Pembangunan SPAM Desa Kedungurang Kec. Gumelar Pembangunan SPAM Desa Petahunan Kec. Pekuncen Pembangunan SPAM RW 09 Desa Darmakradenan Kec. Ajibarang Pembangunan SPAM RW 4 Desa bangsa Kec. Kebasen Pembangunan SPAM Tirta Munjul Grumbul Munjul Desa Karangsari Kec. Kebasen Perluasan SPAM Desa Pernasidi Kec. Cilongok Perluasan SPAM Desa Tumiyang Kec. Pekuncen Perluasan SPAM Desa Wlahar Wetan Kec. Kalibagor
[5] Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang disusun	Dokumen	1	1	100.000.000	1	99.755.700	100	100%	Jasa Konsultansi Geolistrik sudah realisasi di Tw 3.
[5] Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangun	Liter/Detik	24.6	18,4	10.650.000.000	24.6	10.519.977.000	136.67	99%	
[5] Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang ditingkatkan	Liter/Detik	2.3	1,6	690.337.492	2.3	683.359.495	230	99%	Baru Paket SPAM Desa Rempoah yang sudah PHO.

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan dan Sub Kegiatan (Output)	Satuan	Realisasi Renstra s/d Tahun 2025	Target dan Realisasi Kinerja Program Kegiatan Sub Kegiatan (n-2) Tahun 2025						Keterangan
				Target Renja Perangkat Daerah (Renja Perubahan)	Pagu DPA	Realisasi Kinerja Renja PD	Realisasi Anggaran	Capaian Kinerja Renja Perangkat Daerah (%)	Capaian Anggaran (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9=7/5	10=8/6	11
[5] Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	SR	77	140	500.000.000	77	498.565.000	55	100%	Membutuhkan jaringan pipa yang lebih panjang dari yang direncanakan.
[2] Meningkatnya akses infrastruktur pelayanan dasar Air Limbah yang berkualitas	Persentase Peningkatan Rumah Tangga dengan Akses Air Limbah Domestik	%	0.97	1.36		0.97		71.32		capaian tahun 2025 = 93,24 capaian tahun 2024 = 94.24 peningkatan = 94,21 - 93,24 = 0.97
[3] PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase rumah tinggal berakses sanitasi	%	94.21	94,6	14.019.158.100	94.21	13.827.162.182	100.22	99%	CapaianSanitasi layak berdasarkan berita acara keepakatan, Jumat 12 Desember 2025 antara Bappedalitbang, Dinperkim, PDAM dan Dinkes sebesar 94.21%
[4] Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah lokasi penanganan air limbah	Lokasi	44	30	14.019.158.100	44	13.827.162.182	146.67	99%	Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Desa Gunung Wetan Kec. Jatilawang Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Desa Panembangan Kec. Cilongok Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Desa Karangtalun Kidul Kec. Purwojati Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Desa Kutasari Kec. Baturraden Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Desa Banjarsari Kulon Kec. Sumbang (DAK) Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Desa Banjarsari Wetan Kec. Sumbang (DAK) Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Desa Dawuhan Kulon Kec. Kedungbanteng (DAK) Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Desa Jambu Kec. Wangon (DAK) Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Desa Kalikidang Kec. Sokaraja (DAK)

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan dan Sub Kegiatan (Output)	Satuan	Realisasi Renstra s/d Tahun 2025	Target dan Realisasi Kinerja Program Kegiatan Sub Kegiatan (n-2) Tahun 2025						Keterangan
				Target Renja Perangkat Daerah (Renja Perubahan)	Pagu DPA	Realisasi Kinerja Renja PD	Realisasi Anggaran	Capaian Kinerja Renja Perangkat Daerah (%)	Capaian Anggaran (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9=7/5	10=8/6	11
										Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Desa Kalisari Kec. Cilongok (DAK) Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Desa Karanglo Kec. Cilongok (DAK) Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Desa Kebumen Kec. Baturraden (DAK) Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Desa Kemiri Kec. Sumpiuh (DAK) Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Desa Kuntili Kec. Sumpiuh (DAK) Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Desa Linggasari Kec. Kembaran (DAK) Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Desa Melung Kec. Kedungbanteng (DAK) Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Desa Paningkaban Kec. Gumelar (DAK) Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Desa Panusupan Kec. Cilongok (DAK) Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Desa Petir Kec. Kalibagor (DAK) Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Desa Pliken Kec. Kembaran (DAK) Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Desa Purbadana Kec. Kembaran (DAK) Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Desa Selanegara Kec. Sumpiuh (DAK) Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Desa Silado Kec. Sumbang (DAK) Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Desa Sokaraja Lor Kec. Sokaraja (DAK) Pembangunan Tangki

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan dan Sub Kegiatan (Output)	Satuan	Realisasi Renstra s/d Tahun 2025	Target dan Realisasi Kinerja Program Kegiatan Sub Kegiatan (n-2) Tahun 2025						Keterangan
				Target Renja Perangkat Daerah (Renja Perubahan)	Pagu DPA	Realisasi Kinerja Renja PD	Realisasi Anggaran	Capaian Kinerja Renja Perangkat Daerah (%)	Capaian Anggaran (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9=7/5	10=8/6	11
										Septik Skala Individual Desa Somakaton Kec. Somagede (DAK) Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Desa Srowot Kec. Kalibagor (DAK) Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Desa Tambaksari Kidul Kec. Kembaran (DAK) Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Desa Windunegara Kec. Wangon (DAK) Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Desa Alasmalang Kec. Kemranjen (Earmark) Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Desa Karangdadap Kec. Kalibagor (Earmark) Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Desa Kebarongan Kec. Kemranjen (Earmark) Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Desa Kemawi Kec. Somagede (Earmark) Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Desa Pageralang Kec. Kemranjen (Earmark) Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Desa Sokawera Kec. Somagede (Earmark) Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Desa Tanggeran Kec. Somagede (Earmark) PAD Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Desa Banjarsari Kec. AJibarang Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Desa Gerduren Kec. Purwojati Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Desa Kalitapen Kec. Purwojati Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Desa Rempoah Kec. Baturraden Pembangunan Tangki Seprik Skala Individual di

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan dan Sub Kegiatan (Output)	Satuan	Realisasi Renstra s/d Tahun 2025	Target dan Realisasi Kinerja Program Kegiatan Sub Kegiatan (n-2) Tahun 2025						Keterangan
				Target Renja Perangkat Daerah (Renja Perubahan)	Pagu DPA	Realisasi Kinerja Renja PD	Realisasi Anggaran	Capaian Kinerja Renja Perangkat Daerah (%)	Capaian Anggaran (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9=7/5	10=8/6	11
										wilayah Jl. Margasari Desa Tambaksari Kidul Kec. Kembaran Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Desa Kaliori Kec. Kalibagor Pembangunan Tangki Septik Skala Individual di wilayah Jl. Pramuka Desa Tambaksari Kidul Kec. Kembaran Pembangunan Tangki Septik Skala Individual di wilayah Jl. Suci dan Jl. Setia Desa Tambaksari Kidul Kec. Kembaran Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Kel. Arcawinangun RT 07,03 RW 01 dan Kel. Purwokerto Wetan Rt 02 RW 05 Kec. Purwokerto Timur
	<i>Jumlah masyarakat yang terfasilitasi pelayanan lumpur tinja</i>	Rumah	802	340		802		235.88		Penyedotan sampai dengan TW IV = 364 User
[5] Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat	<i>Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Toilet dan Tangki Septik Sesuai dengan Standar</i>	Rumah Tangga	1511	1440	13.819.158.100	1511	13.636.376.182	104.93	99%	Paket Desa Panembangan Akhir Kontrak 19 Desember 2025, bertambah 23 penerima manfaat.
[5] Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	<i>Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang disusun</i>	Dokumen	2	2	200.000.000	2	190.786.000	100	95%	DED Optimalisasi IPLT dan Jasa Konsultansi Penyusunan RISPALD.

II.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

A Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 89 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, adalah sebagai berikut:

1. Tugas Pokok

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Banyumas mempunyai tugas membantu Bupati menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman dan bidang pertanahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

2. Fungsi

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Banyumas menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang perumahan dan kawasan permukiman dan bidang pertanahan;
- b. pelaksanaan kebijakan dan pengoordinasian pelaksanaan tugas di bidang perumahan dan kawasan permukiman dan bidang pertanahan;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perumahan dan kawasan permukiman dan bidang pertanahan;

Adapun susunan organisasi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Banyumas terdiri dari:

1. Kepala Dinas;
2. Sekretariat, terdiri dari:
 - a. Sub Bagian Keuangan;
 - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
3. Bidang Perumahan dan Pertanahan;
4. Bidang Kawasan Permukiman; dan
5. Kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana.

B. Perkiraan Pencapaian Tahun Anggaran 2026

Untuk tahun berjalan yakni anggaran induk belanja tahun 2026 sebesar Rp.26.528.557.597,00 terurai dalam 9 (sembilan) program dan 18 (delapan belas) kegiatan, diharapkan keberhasilan kinerja dapat mencapai 100% atau meningkat dari tahun 2025, baik dalam hal realisasi keuangan maupun realisasi fisiknya.

Tabel T-C.30
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

No	Indikator	SPM	IKK	SATUAN	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
					2025	2026	2027	2028	2025	2026	2027	2028	
1	1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN												
1.1	Rasio Permukiman Layak Huni			Angka	0,9981	0,9984	0,9988	0,9992	N/A	0,9992	0,9988	0,9992	
1.2	Rasio Rumah Layak Huni			Angka	0,2204	0,2234	0,2266	0,23	N/A	0,23	0,2266	0,23	
1.3	Persentase Cakupan Rumah Layak Huni			%	85,1	85,65	86,22	86,8	N/A	86,8	86,22	86,8	
2	2.10 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN												
2.1	Indeks Tertib Administrasi Pertanahan			Indeks	61,38	67	72,63	78,25	N/A	67	72,63	78,25	
1	Presentase Drainase Lingkungan dalam kondisi baik		✓	%	42,69	42,95	43,21	43,47	N/A	42,95	43,21	43,47	
2	Persentase PSU Perumahan yang diserahkan ke Pemerintah Daerah		✓	%	44,22	47,52	50,83	54,13	N/A	47,52	50,83	54,13	
3	Persentase Jalan Lingkungan Permukiman dalam Kondisi Baik		✓	%	41,61	43,21	44,82	46,42	N/A	43,21	44,82	46,42	
4	Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)		✓	%	100	100	100	100	N/A	100	100	100	
5	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kab yang ditangani		✓	%	55,41	19,39	38,77	58,16	N/A	19,39	38,77	58,16	
6	Persentase tanah yang terfasilitasi redistribusi		✓	%	100	100	100	100	N/A	100	100	100	
7	Tersedianya Tanah Obyek Landreform (TOL) yang siap didistribusikan yang berasal dari Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee		✓	%	100	100	100	100	N/A	100	100	100	
8	Persentase bidang tanah yang dikonsolidasikan		✓	%	100	100	100	100	N/A	100	100	100	
9	Persentase bidang tanah perumahan yang disertifikatkan		✓	%	100	100	100	100	N/A	100	100	100	
10	Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan		✓	%	100	100	100	100	N/A	100	100	100	
11	Persentase Penetapan Tanah Untuk Pembangunan Fasilitas Umum		✓	%	100	100	100	100	N/A	100	100	100	

No	Indikator	SPM	IKK	SATUAN	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
					2025	2026	2027	2028	2025	2026	2027	2028	
12	Tersedianya Lokasi Pembangunan Dalam Rangka Penanaman Modal		✓	%	100	100	100	100	N/A	100	100	100	
13	Tersedianya tanah untuk masyarakat		✓	%	100	100	100	100	N/A	100	100	100	
14	Penanganan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi		✓	%	100	100	100	100	N/A	100	100	100	
15	Persentase Cakupan Rumah Layak Huni		✓	%	85,1	85,65	86,22	86,8	N/A	85,65	86,22	86,8	
16	Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)		✓	%	14,9	14,35	13,78	13,2	N/A	14,35	13,78	13,2	
17	Persentase tersedianya rumah layak huni bagi korban bencana	✓	✓	%	100	100	100	100	N/A	100	100	100	
18	Persentase tersedianya rumah layak huni bagi warga terdampak relokasi akibat program pemerintah	✓	✓	%	100	100	100	100	N/A	100	100	100	
19	IKM Perangkat Daerah		✓	Angka	95	95	95	95	N/A	95	95	95	
20	Persentase Realisasi APBD Perangkat Daerah		✓	%	95	95	95	95	N/A	95	95	95	
21	Persentase IP ASN Pegawai pada Perangkat Daerah bernilai sedang - sangat tinggi		✓	%	75	75,5	76	76,5	N/A	75,5	76	76,5	
22	Nilai kematangan organisasi		✓	Angka	48	49	49	49	N/A	49	49	49	
23	Persentase Pemenuhan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		✓	%	100	100	100	100	N/A	100	100	100	

II.3. ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH

Berdasarkan hasil yang diperoleh melalui penilaian kinerja terhadap program maupun kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2025 serta perkiraan capaian program dan kegiatan tahun 2026 dapat dikemukakan beberapa hal dalam pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Banyumas adalah sebagai berikut:

Permasalahan

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Banyumas menghadapi berbagai tantangan dan hambatan serta dukungan baik secara internal maupun eksternal yang dapat dianalisis dengan menggunakan SWOT (*Strength, Weakness, Opportunities, Treats*). Analisis SWOT juga merupakan alat analisis untuk menyusun isu-isu strategis yang menggambarkan tujuan yang akan dicapai dan hambatan-hambatan yang mungkin akan dihadapi dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman. Untuk lebih jelasnya hasil analisis SWOT sebagai berikut:

A. *Strenght* (Kekuatan).

1. Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan salah satu faktor kunci dalam menunjang efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Banyumas. Saat ini, DINPERKIM Kabupaten Banyumas didukung oleh 73 (tujuh puluh tiga) orang pegawai, yang terdiri atas 32 (tiga puluh dua) orang Pegawai Negeri Sipil (PNS), 16 (enam belas) orang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), 22 (dua puluh lima) orang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu (PPPK PW, dan 3 (tiga) orang tenaga alih daya. Pembagian tugas dan pekerjaan semaksimal mungkin disesuaikan dengan jenjang Pendidikan agar dapat menghasilkan output pekerjaan yang optimal.
2. Sarana dan prasarana, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Banyumas telah didukung oleh fasilitas yang relatif memadai, baik berupa aset bergerak maupun aset tidak bergerak. Sarana dan prasarana yang dimiliki DINPERKIM

Kabupaten Banyumas meliputi bangunan gedung serta peralatan dan mesin.

3. Adanya tupoksi yang jelas sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Bupati Banyumas Nomor 89 Tahun 2025 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Banyumas. Tupoksi yang jelas merupakan modal dasar yang sangat penting, dan memberikan kekuatan yang jelas dalam melaksanakan tugas perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan, pembinaan dan supervisi, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman dan pertanahan yang meliputi Bidang Perumahan dan Pertanahan dan Bidang Kawasan Permukiman yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada kabupaten.

B. *Weakness* (Kelemahan).

Disamping kekuatan yang dimiliki dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi yaitu dalam perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan, pembinaan dan supervisi, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman dan pertanahan yang meliputi Bidang Perumahan dan Pertanahan dan Bidang Kawasan Permukiman yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada kabupaten, tentunya ditemukan kelemahan-kelemahan yang harus diperhatikan. Kelemahan-kelemahan tersebut antara lain:

1. Terbatasnya anggaran.

Terbatasnya anggaran yang masih menjadi kelemahan di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Banyumas. APBD Tahun 2026 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Banyumas sebesar Rp.26.528.557.597,00 dirasa masih belum dapat memenuhi kebutuhan anggaran untuk kegiatan-kegiatan yang masih memerlukan banyak anggaran yang dialokasikan untuk berbagai Kegiatan strategis, seperti perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), Penerapan Standar Layanan Minimal (SPM) Bidang Perumahan Rakyat (PR), pembangunan jalan lingkungan dan drainase, sering kali terbagi ke dalam beberapa program yang memiliki kebutuhan tinggi. Hal ini mengakibatkan adanya risiko bahwa output dari masing-

masing kegiatan tidak dapat terlaksana secara maksimal. Keterbatasan anggaran dan kebutuhan yang beragam berpotensi menurunkan efektivitas pelaksanaan program secara keseluruhan.

2. Ketergantungan pada Dana Transfer Pusat.

Sebagian besar kegiatan strategis yang dilaksanakan oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Banyumas masih sangat bergantung pada pendanaan dari pemerintah pusat, khususnya melalui skema Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dan Dana Alokasi Umum (DAU) yang bersifat *earmark*. Kegiatan yang dibiayai melalui dana transfer pusat tersebut antara lain pembangunan rumah layak huni, penanganan kawasan kumuh, peningkatan kualitas permukiman, serta pengembangan infrastruktur dasar permukiman. Tingginya ketergantungan terhadap pendanaan pusat menimbulkan kerentanan terhadap keberlanjutan program, karena pelaksanaan kegiatan sangat dipengaruhi oleh kepastian waktu penyaluran dan besaran alokasi dana yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Apabila penyaluran dana tidak berlangsung sesuai jadwal, mengalami penundaan, atau bahkan tidak dapat disalurkan akibat kendala administratif, teknis, maupun perubahan kebijakan nasional, maka pelaksanaan sejumlah kegiatan prioritas berpotensi mengalami keterlambatan, penundaan, hingga tidak dapat direalisasikan. Kondisi tersebut berdampak langsung terhadap pencapaian target kinerja tahunan dan sasaran Renstra perangkat daerah, serta berimplikasi pada menurunnya efektivitas pelayanan kepada masyarakat.

C. Opportunity (Peluang).

Setelah menganalisis kekuatan (*strength*) dan kelemahan (*weakness*), perlu dilakukan analisis terhadap peluang-peluang yang dapat diciptakan guna mendukung perencanaan teknis operasional urusan pemerintahan daerah di bidang perumahan dan kawasan permukiman dan pertanahan, antara lain:

1. Dukungan Kebijakan dan Pendanaan, seperti tersedianya dukungan dari Pemerintah Daerah, Pemerintah Pusat, serta sektor swasta melalui program *Corporate Social Responsibility* (CSR) menjadi faktor strategis dalam menunjang keberhasilan

pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Banyumas. Semakin berkembangnya kebutuhan akses dan kecepatan informasi serta perkembangan teknologi informasi yang cepat dan dinamis.

2. Perkembangan Teknologi Informasi, misalnya Kebutuhan masyarakat terhadap akses informasi yang cepat dan mudah, seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi informasi, menjadi peluang untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik di bidang perumahan dan permukiman dan pertanahan.
3. Peningkatan Partisipasi Masyarakat, dimana semakin tingginya kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan perumahan dan kawasan permukiman dapat memperkuat kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat dalam mewujudkan lingkungan hunian yang layak dan berkelanjutan.

D. *Treats* (Ancaman).

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Banyumas tidak terlepas dari berbagai tantangan dan ancaman yang berpotensi menghambat kelancaran proses teknis operasional pemerintahan daerah. Beberapa ancaman yang mungkin terjadi antara lain:

1. Keterbatasan alokasi anggaran daerah dan ketergantungan terhadap sumber eksternal seperti dukungan pendanaan dari pemerintah pusat maupun pihak ketiga (CSR) dapat menghambat kelangsungan dan penyelesaian program kegiatan, terutama dalam skala besar.
2. Adanya perubahan kebijakan dari pemerintah pusat atau peraturan perundang-undangan yang bersifat dinamis dapat memengaruhi perencanaan, pelaksanaan, maupun evaluasi kegiatan yang telah disusun di tingkat daerah.
3. Tingkat kepedulian masyarakat yang belum merata, meskipun partisipasi masyarakat cenderung meningkat, masih terdapat elemen masyarakat yang belum memiliki kepedulian tinggi terhadap program-program di bidang perumahan dan kawasan permukiman dan pertanahan, khususnya terkait perilaku hidup bersih dan sehat serta pemeliharaan lingkungan.

4. Kerusakan Infrastruktur pendukung seperti jalan lingkungan, drainase berisiko mengalami kerusakan akibat cuaca ekstrem, bencana alam, atau beban penggunaan yang tinggi, yang dapat menghambat layanan kepada masyarakat.
5. Masih terbatasnya jumlah dan kompetensi SDM teknis serta belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi dalam proses pelayanan dan manajemen aset menjadi tantangan dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banyumas Tahun 2025-2029, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Banyumas telah menetapkan strategi dan kebijakan sebagai berikut:

1. Mendorong percepatan perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) melalui skema kolaboratif antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta (CSR) dan memprioritaskan intervensi RTLH pada kawasan padat penduduk dan rentan terhadap bencana.
2. Meningkatkan kualitas dan cakupan sarana prasarana dasar permukiman, seperti sistem drainase lingkungan, jalan lingkungan serta mengintegrasikan pembangunan infrastruktur dengan pendekatan berbasis kawasan dan berkelanjutan.
3. Mengurangi risiko bencana permukiman dan meningkatkan kesadaran masyarakat melalui program edukasi lingkungan dan partisipasi aktif dalam pemeliharaan fasilitas umum.
4. Meningkatkan penggunaan teknologi informasi dalam proses perencanaan, pelaporan, dan pelayanan kepada masyarakat guna mendorong transparansi, efektivitas, dan efisiensi kinerja dan membangun sistem informasi permukiman terpadu sebagai basis data pengambilan kebijakan yang akurat dan tepat sasaran.
5. Memperluas kemitraan dengan pemerintah pusat, lembaga donor, swasta, serta komunitas lokal dalam perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan perumahan dan permukiman dan mengintegrasikan kegiatan lintas sektor dalam satu visi pembangunan kawasan yang inklusif dan berkelanjutan.

II.4. REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RENJA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN BANYUMAS

Dalam rangka menyesuaikan kondisi yang mengalami perubahan pada periode implementasi Renja, maka Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Banyumas melaksanakan review terkait dengan target kinerja dengan mendasarkan kebutuhan anggaran pada tahun berjalan. Hasil reuiu terhadap Rancangan Awal Renja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Banyumas adalah sebagai berikut:

Tabel T-C. 31.
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2027
Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

No	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Satuan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan/ Sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)
1	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Kab. Banyumas	Presentase Drainase Lingkungan dalam kondisi baik	%	43,21	6.341.900.000,00	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Kab. Banyumas	Presentase Drainase Lingkungan dalam kondisi baik	%	6.341.900.000,00
		Kab. Banyumas	Persentase PSU Perumahan yang diserahkan ke Pemerintah Daerah	%	50,83			Kab. Banyumas	Persentase PSU Perumahan yang diserahkan ke Pemerintah Daerah	%	
		Kab. Banyumas	Persentase Jalan Lingkungan Permukiman dalam Kondisi Baik	%	44,82			Kab. Banyumas	Persentase Jalan Lingkungan Permukiman dalam Kondisi Baik	%	
		Kab. Banyumas	Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	%	100,00			Kab. Banyumas	Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	%	
	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Kab. Banyumas	Jumlah PSU Perumahan yang diserahkan	Dokumen	10,0	6.341.900.000,00	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Kab. Banyumas	Jumlah PSU Perumahan yang diserahkan	Dokumen	6.341.900.000,00
		Kab. Banyumas	Jumlah Panjang Jalan Lingkungan yang Ditangani	Km	6,35			Kab. Banyumas	Jumlah Panjang Jalan Lingkungan yang Ditangani	Km	
		Kab. Banyumas	Panjang Drainase yang dibangun ditingkatkan dan dipelihara	Meter	2.055,00			Kab. Banyumas	Panjang Drainase yang dibangun ditingkatkan dan dipelihara	Meter	
		Kab. Banyumas	Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	%	100,00			Kab. Banyumas	Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	%	
	Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	Kab. Banyumas	Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	Dokumen	10,00	40.000.000,00	Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	Kab. Banyumas	Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	Dokumen	40.000.000,00
	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	Kab. Banyumas	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	Laporan	2,00	75.000.000,00	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	Kab. Banyumas	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	Laporan	75.000.000,00
	Verifikasi dan Penyerahan PSU Perumahan dari Pengembang	Kab. Banyumas	Jumlah Laporan Hasil Serah Terima PSU Perumahan yang Terverifikasi dari Pengembang	Laporan	10,00	75.000.000,00	Verifikasi dan Penyerahan PSU Perumahan dari Pengembang	Kab. Banyumas	Jumlah Laporan Hasil Serah Terima PSU Perumahan yang Terverifikasi dari Pengembang	Laporan	75.000.000,00
	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan	Kab. Banyumas	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum	Lokasi	80,00	6.151.900.000,00	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan	Kab. Banyumas	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum	Lokasi	6.151.900.000,00
2	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Kab. Banyumas	Persentase kawasan permukiman kumuh	%	38,77	1.341.600.000,00	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Kab. Banyumas	Persentase kawasan permukiman kumuh	%	1.341.600.000,00

No	Rancangan Awal RKPd						Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Satuan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan/ Sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)
			dibawah 10 ha di kab yang ditangani						dibawah 10 ha di kab yang ditangani		
	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Kab. Banyumas	Jumlah luas kawasan kumuh (siswa kumuh)	Ha	31,58	15.000.000,00	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Kab. Banyumas	Jumlah luas kawasan kumuh (siswa kumuh)	Ha	15.000.000,00
	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni Serta Kesadaran Hukum Tentang Kepemilikan Rumah	Kab. Banyumas	Jumlah Rumah Tangga yang Terfasilitasi Peningkatan Kesadaran dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Rumah Tangga	50,00	15.000.000,00	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni Serta Kesadaran Hukum Tentang Kepemilikan Rumah	Kab. Banyumas	Jumlah Rumah Tangga yang Terfasilitasi Peningkatan Kesadaran dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Rumah Tangga	15.000.000,00
	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Kab. Banyumas	Jumlah luas kawasan kumuh (siswa kumuh)	Ha	31,58	1.326.600.000,00	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Kab. Banyumas	Jumlah luas kawasan kumuh (siswa kumuh)	Ha	1.326.600.000,00
	Pendataan dan Verifikasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Kumuh	Kab. Banyumas	Jumlah Dokumen Data Permukiman Kumuh yang Terverifikasi	Dokumen	2,00	200.000.000,00	Pendataan dan Verifikasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Kumuh	Kab. Banyumas	Jumlah Dokumen Data Permukiman Kumuh yang Terverifikasi	Dokumen	200.000.000,00
	Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh	Kab. Banyumas	Luas Permukiman Kumuh yang Dipugar	Ha	15,00	1.126.600.000,00	Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh	Kab. Banyumas	Luas Permukiman Kumuh yang Dipugar	Ha	1.126.600.000,00
3	PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE	Kab. Banyumas	Persentase tanah yang terfasilitasi redistribusi	%	100,00	102.000.000,00	PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE	Kab. Banyumas	Persentase tanah yang terfasilitasi redistribusi	%	102.000.000,00
		Kab. Banyumas	Tersedianya Tanah Obyek Landreform (TOL) yang siap diredistribusikan yang berasal dari Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	%	100,00			Kab. Banyumas	Tersedianya Tanah Obyek Landreform (TOL) yang siap diredistribusikan yang berasal dari Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	%	
	Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Banyumas	Jumlah lokasi objek redistribusi tanah	Lokasi	1,00	102.000.000,00	Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Banyumas	Jumlah lokasi objek redistribusi tanah	Lokasi	102.000.000,00
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Kab. Banyumas	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Dokumen	1,00	102.000.000,00	Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Kab. Banyumas	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Dokumen	102.000.000,00
4	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	Kab. Banyumas	Persentase bidang tanah yang dikonsolidasikan	%	100,00	400.000.000,00	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	Kab. Banyumas	Persentase bidang tanah yang dikonsolidasikan	%	400.000.000,00
		Kab. Banyumas	Persentase bidang tanah perumahan yang disertifikatkan	%	100,00			Kab. Banyumas	Persentase bidang tanah perumahan yang disertifikatkan	%	

No	Rancangan Awal RKPД						Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Satuan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan/ Sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)
		Kab. Banyumas	Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan	%	100,00			Kab. Banyumas	Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan	%	
		Kab. Banyumas	Persentase Penetapan Tanah Untuk Pembangunan Fasilitas Umum	%	100,00			Kab. Banyumas	Persentase Penetapan Tanah Untuk Pembangunan Fasilitas Umum	%	
		Kab. Banyumas	Tersedianya Lokasi Pembangunan Dalam Rangka Penanaman Modal	%	100,00			Kab. Banyumas	Tersedianya Lokasi Pembangunan Dalam Rangka Penanaman Modal	%	
	Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Banyumas	Jumlah bidang tanah PSU Perumahan yang disertifikatkan	Sertifikat	20,00	400.000.000,00	Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Banyumas	Jumlah bidang tanah PSU Perumahan yang disertifikatkan	Sertifikat	400.000.000,00
		Kab. Banyumas	Jumlah Bidang Tanah yang dikonsolidasi tahun n	Bidang	100,00			Kab. Banyumas	Jumlah Bidang Tanah yang dikonsolidasi tahun n	Bidang	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	Kab. Banyumas	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Laporan	1,00	150.000.000,00	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	Kab. Banyumas	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Laporan	150.000.000,00
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota	Kab. Banyumas	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	1,00	250.000.000,00	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota	Kab. Banyumas	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	250.000.000,00
5	PROGRAM PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH	Kab. Banyumas	Tersedianya tanah untuk masyarakat	%	100,00	102.000.000,00	PROGRAM PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH	Kab. Banyumas	Tersedianya tanah untuk masyarakat	%	102.000.000,00
	Penerbitan Izin Membuka Tanah	Kab. Banyumas	Jumlah kegiatan ijin membuka tanah	Kegiatan	1,00	102.000.000,00	Penerbitan Izin Membuka Tanah	Kab. Banyumas	Jumlah kegiatan ijin membuka tanah	Kegiatan	102.000.000,00
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Izin Membuka Tanah	Kab. Banyumas	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Pemberian Izin Membuka Tanah	Dokumen	1,00	102.000.000,00	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Izin Membuka Tanah	Kab. Banyumas	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Pemberian Izin Membuka Tanah	Dokumen	102.000.000,00
6	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	Kab. Banyumas	Penanganan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi	%	100,00	102.000.000,00	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	Kab. Banyumas	Penanganan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi	%	102.000.000,00
	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Banyumas	Jumlah Kegiatan Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kegiatan	1,00	102.000.000,00	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Banyumas	Jumlah Kegiatan Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kegiatan	102.000.000,00
	Inventarisasi Kasus Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Banyumas	Jumlah Data Kasus Pertanahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	1,00	102.000.000,00	Inventarisasi Kasus Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Banyumas	Jumlah Data Kasus Pertanahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	102.000.000,00
		Kab. Banyumas	Persentase Peningkatan Rumah Layak Huni	%	0,66			Kab. Banyumas	Persentase Peningkatan Rumah Layak Huni	%	

No	Rancangan Awal RKPД						Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Satuan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan/ Sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)
7	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Kab. Banyumas	Persentase Cakupan Rumah Layak Huni	%	86,22	14.284.200.000,00	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Kab. Banyumas	Persentase Cakupan Rumah Layak Huni	%	14.284.200.000,00
		Kab. Banyumas	Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	%	13,78			Kab. Banyumas	Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	%	
	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Banyumas	Jumlah RTLH yang Ditangani sampai dengan Tahun n	Angka	30,70	14.284.200.000,00	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Banyumas	Jumlah RTLH yang Ditangani sampai dengan Tahun n	Angka	14.284.200.000,00
	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Kab. Banyumas	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki	Angka	1.800,00	14.284.200.000,00	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Kab. Banyumas	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki	Angka	14.284.200.000,00
8	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Kab. Banyumas	Persentase tersedianya rumah layak huni bagi korban bencana	%	100,00	4.943.300.000,00	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Kab. Banyumas	Persentase tersedianya rumah layak huni bagi korban bencana	%	4.943.300.000,00
		Kab. Banyumas	Persentase tersedianya rumah layak huni bagi warga terdampak relokasi akibat program pemerintah	%	100,00			Kab. Banyumas	Persentase tersedianya rumah layak huni bagi warga terdampak relokasi akibat program pemerintah	%	
	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Kab. Banyumas	Jumlah dokumen Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten	Dokumen	6,00	2.400.000.000,00	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Kab. Banyumas	Jumlah dokumen Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten	Dokumen	2.400.000.000,00
	Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	Kab. Banyumas	Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Dokumen	1,00	500.000.000,00	Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	Kab. Banyumas	Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Dokumen	500.000.000,00
	Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus	Kab. Banyumas	Jumlah Dokumen Data Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun, dan Rumah Khusus	Dokumen	1,00	300.000.000,00	Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus	Kab. Banyumas	Jumlah Dokumen Data Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun, dan Rumah Khusus	Dokumen	300.000.000,00
	Identifikasi Perumahan di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Kab. Banyumas	Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Dokumen	1,00	550.000.000,00	Identifikasi Perumahan di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Kab. Banyumas	Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Dokumen	550.000.000,00
	Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Kab. Banyumas	Jumlah Dokumen Data Bakal Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/ Kota yang Terverifikasi	Dokumen	1,00	150.000.000,00	Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Kab. Banyumas	Jumlah Dokumen Data Bakal Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/ Kota yang Terverifikasi	Dokumen	150.000.000,00
	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Kab. Banyumas	Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Dokumen	1,00	550.000.000,00	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Kab. Banyumas	Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Dokumen	550.000.000,00
	Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah	Kab. Banyumas	Jumlah Dokumen Data Bakal Calon Penerima	Dokumen	1,00	350.000.000,00	Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah	Kab. Banyumas	Jumlah Dokumen Data Bakal Calon Penerima	Dokumen	350.000.000,00

No	Rancangan Awal RKPД						Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Satuan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan/ Sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)
	bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota		Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terverifikasi				bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota		Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terverifikasi		
	Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Kab. Banyumas	Jumlah Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Kegiatan	2,00	443.300.000,00	Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Kab. Banyumas	Jumlah Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Kegiatan	443.300.000,00
	Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana	Kab. Banyumas	Jumlah Orang/Sukarelawan yang Mengikuti Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota	Orang	47,00	243.300.000,00	Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana	Kab. Banyumas	Jumlah Orang/Sukarelawan yang Mengikuti Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota	Orang	243.300.000,00
	Pembentukan dan Pelatihan Tim Satgas, Tim Pendamping dan Fasilitator	Kab. Banyumas	Jumlah Orang pada Tim Satgas, Tim Pendamping, dan Fasilitator yang Terbentuk dan Terlatih	Orang	6,00	200.000.000,00	Pembentukan dan Pelatihan Tim Satgas, Tim Pendamping dan Fasilitator	Kab. Banyumas	Jumlah Orang pada Tim Satgas, Tim Pendamping, dan Fasilitator yang Terbentuk dan Terlatih	Orang	200.000.000,00
	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Kab. Banyumas	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	%	55,00	1.900.000.000,00	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Kab. Banyumas	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	%	1.900.000.000,00
	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Kab. Banyumas	Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi	Unit Rumah	15,00	300.000.000,00	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Kab. Banyumas	Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi	Unit Rumah	300.000.000,00
	Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	Kab. Banyumas	Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terbangun	Unit Rumah	10,00	800.000.000,00	Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	Kab. Banyumas	Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terbangun	Unit Rumah	800.000.000,00
		Kab. Banyumas	Bantuan akses rumah sewa layak huni bagi korban bencana	Unit Rumah	10,00			Kab. Banyumas	Bantuan akses rumah sewa layak huni bagi korban bencana	Unit Rumah	
		Kab. Banyumas	Pemukiman kembali bagi korban bencana	Unit Rumah	10,00			Kab. Banyumas	Pemukiman kembali bagi korban bencana	Unit Rumah	
	Pembangunan Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Kabupaten/Kota	Kab. Banyumas	Jumlah Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Kabupaten/Kota	Unit Rumah	20,00	800.000.000,00	Pembangunan Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Kabupaten/Kota	Kab. Banyumas	Jumlah Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Kabupaten/Kota	Unit Rumah	800.000.000,00
		Kab. Banyumas	Bantuan akses Rumah Sewa Layak Huni	Unit Rumah	20,00			Kab. Banyumas	Bantuan akses Rumah Sewa Layak Huni	Unit Rumah	
		Kab. Banyumas	Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten	%	100,00			Kab. Banyumas	Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten	%	
	Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Kab. Banyumas	Jumlah kegiatan serah terima rumah terdampak bencana dan relokasi akibat program pemerintah	Kegiatan	1,00	200.000.000,00	Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Kab. Banyumas	Jumlah kegiatan serah terima rumah terdampak bencana dan relokasi akibat program pemerintah	Kegiatan	200.000.000,00
	Penatausahaan Serah Terima Rumah bagi	Kab. Banyumas	Jumlah Dokumen Serah Terima Rumah bagi	Dokumen	1,00	100.000.000,00	Penatausahaan Serah Terima Rumah bagi	Kab. Banyumas	Jumlah Dokumen Serah Terima Rumah bagi	Dokumen	100.000.000,00

No	Rancangan Awal RKPd						Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Satuan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan/ Sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)
	Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota		Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota				Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota		Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota		
	Penatausahaan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Kab. Banyumas	Jumlah Dokumen Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Dokumen	1,00	100.000.000,00	Penatausahaan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Kab. Banyumas	Jumlah Dokumen Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Dokumen	100.000.000,00
9	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kab. Banyumas	IKM Perangkat Daerah	Angka	95,00	10.198.000.000,00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kab. Banyumas	IKM Perangkat Daerah	Angka	10.198.000.000,00
		Kab. Banyumas	Persentase Realisasi APBD Perangkat Daerah	%	95,00			Kab. Banyumas	Persentase Realisasi APBD Perangkat Daerah	%	
		Kab. Banyumas	Persentase IP ASN Pegawai pada Perangkat Daerah bernilai sedang - sangat tinggi	%	76,00			Kab. Banyumas	Persentase IP ASN Pegawai pada Perangkat Daerah bernilai sedang - sangat tinggi	%	
		Kab. Banyumas	Nilai kematangan organisasi	Angka	49,00			Kab. Banyumas	Nilai kematangan organisasi	Angka	
		Kab. Banyumas	Persentase Pemenuhan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%	100,00			Kab. Banyumas	Persentase Pemenuhan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Banyumas	Persentase Kesesuaian Program Renja Perangkat Daerah dengan Renstra Perangkat Daerah	%	100,00	190.000.000,00	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Banyumas	Persentase Kesesuaian Program Renja Perangkat Daerah dengan Renstra Perangkat Daerah	%	190.000.000,00
		Kab. Banyumas	Persentase kesesuaian Program Renja Perangkat Daerah dengan DPA	%	100,00			Kab. Banyumas	Persentase kesesuaian Program Renja Perangkat Daerah dengan DPA	%	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Banyumas	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	4,00	50.000.000,00	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Banyumas	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	50.000.000,00
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Banyumas	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.	Laporan	3,00	140.000.000,00	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Banyumas	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.	Laporan	140.000.000,00
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Banyumas	Persentase Pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	%	100,00	689.896.638,00	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Banyumas	Persentase Pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	%	689.896.638,00
		Kab. Banyumas	Nilai pengelolaan arsip perangkat daerah	Angka	70,00			Kab. Banyumas	Nilai pengelolaan arsip perangkat daerah	Angka	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Banyumas	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1,00	17.000.000,00	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Banyumas	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	17.000.000,00
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Banyumas	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	1,00	239.744.138,00	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Banyumas	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	239.744.138,00
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Banyumas	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1,00	23.152.500,00	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Banyumas	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	23.152.500,00

No	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Satuan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan/ Sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Banyumas	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	72,00	400.000.000,00	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Banyumas	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	400.000.000,00
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kab. Banyumas	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	3.000,00	10.000.000,00	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kab. Banyumas	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	10.000.000,00
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Banyumas	Persentase kesesuaian realisasi pengadaan BMD dengan rencana kebutuhan pengadaan barang miik daerah (RKBMd)	%	100,00	370.000.000,00	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Banyumas	Persentase kesesuaian realisasi pengadaan BMD dengan rencana kebutuhan pengadaan barang miik daerah (RKBMd)	%	370.000.000,00
	Pengadaan Mebel	Kab. Banyumas	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	1,00	70.000.000,00	Pengadaan Mebel	Kab. Banyumas	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	70.000.000,00
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Banyumas	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	1,00	90.000.000,00	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Banyumas	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	90.000.000,00
	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Banyumas	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	1,00	210.000.000,00	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Banyumas	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	210.000.000,00
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Banyumas	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%	100,00	2.048.488.838,00	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Banyumas	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%	2.048.488.838,00
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Banyumas	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	48,00	181.770.278,00	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Banyumas	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	181.770.278,00
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Banyumas	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12,00	1.866.718.560,00	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Banyumas	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	1.866.718.560,00
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Banyumas	Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik	%	100,00	517.164.810,00	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Banyumas	Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik	%	517.164.810,00
		Kab. Banyumas	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Urusan Pemerintahan Daerah	%	100,00			Kab. Banyumas	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Urusan Pemerintahan Daerah	%	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Banyumas	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	34,00	187.164.810,00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Banyumas	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	187.164.810,00
	Pemeliharaan Mebel	Kab. Banyumas	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	150,00	30.000.000,00	Pemeliharaan Mebel	Kab. Banyumas	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	30.000.000,00
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Banyumas	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	140,00	100.000.000,00	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Banyumas	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	100.000.000,00
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Banyumas	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	2,00	200.000.000,00	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Banyumas	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	200.000.000,00
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Banyumas	Persentase Pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	%	100,00	6.382.449.714,00	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Banyumas	Persentase Pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	%	6.382.449.714,00

No	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Satuan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan/ Sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)
		Kab. Banyumas	Persentase ketepatan waktu pertanggungjawaban anggaran (SPJ) terhadap pengajuan anggaran (NPD)	%	100,00			Kab. Banyumas	Persentase ketepatan waktu pertanggungjawaban anggaran (SPJ) terhadap pengajuan anggaran (NPD)	%	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Banyumas	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	48,00	6.086.701.514,00	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Banyumas	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	6.086.701.514,00
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab. Banyumas	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	24,00	295.748.200,00	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab. Banyumas	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	295.748.200,00

II.5. PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Banyumas mengakomodir usulan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat, perguruan tinggi dan Lembaga lainnya yang langsung ditujukan kepada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Banyumas maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi dan penelitian lapangan serta pengamatan pelaksanaan Musrenbang Kecamatan. Namun pada penyusunan Rancangan Awal Renja Tahun 2027 ini belum terakomodirnya usulan program dan kegiatan untuk tahun 2027 yang dapat dilihat pada tabel T-C 31 berikut:

**Tabel T-C 32. USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN
DARI PEMANGKU KEPENTINGAN TAHUN 2027
KABUPATEN BANYUMAS**

NO	USULAN	ALAMAT LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN/VOLUME	CATATAN

II.6. INOVASI PERANGKAT DAERAH

Dalam rangka meningkatkan kinerja Pemerintah Daerah, kualitas pelayanan publik, serta efisiensi program dan sumber daya, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Banyumas telah membuat inovasi sebagai berikut:

- a. Doyong Dadi Bombong (Dukungan Secara Gotong Royong Berbasis Data Digital Menuju Masyarakat Bombong).

Inovasi “Doyong Dadi Bombong” merupakan upaya Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Banyumas dalam mendukung percepatan penanganan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) serta pengurangan *backlog* perumahan, khususnya bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Inovasi ini dilatarbelakangi oleh keterbatasan kapasitas pendanaan pemerintah daerah serta belum optimalnya sinergi dan kolaborasi antar pemangku kepentingan dalam penanganan RTLH.

Sebagai respon atas permasalahan tersebut, “Doyong Dadi Bombong” dikembangkan sebagai inovasi berbasis data yang berfungsi memperkuat kolaborasi multipihak dalam penanganan RTLH secara transparan, partisipatif, dan berkelanjutan. Inovasi ini mengadopsi konsep marketplace melalui penyediaan sistem informasi berbasis laman web yang menyajikan katalog RTLH di seluruh wilayah Kabupaten Banyumas, lengkap dengan informasi lokasi, kondisi rumah, dan dokumentasi pendukung. Sistem ini memungkinkan keterlibatan berbagai pihak, baik sektor swasta melalui program CSR, lembaga profit dan nonprofit, komunitas, maupun individu, dalam penyaluran bantuan perbaikan RTLH secara tepat sasaran.

Inovasi “Doyong Dadi Bombong” mulai diinisiasi pada tahun 2024 dan dikembangkan serta diimplementasikan secara bertahap sejak tahun 2025. Pada periode perencanaan, fokus pelaksanaan diarahkan pada penguatan dan pemutakhiran basis data RTLH di seluruh desa dan kelurahan, peningkatan kualitas sistem informasi, serta penguatan koordinasi dan kemitraan dengan pemangku kepentingan terkait.

Melalui implementasi inovasi “Doyong Dadi Bombong”, diharapkan terjadi peningkatan efektivitas dan efisiensi penanganan RTLH, meningkatnya peran serta masyarakat dan dunia usaha dalam penyediaan hunian layak, serta terwujudnya percepatan penurunan jumlah RTLH di Kabupaten Banyumas sesuai dengan target kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Banyumas.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

III.1. TELAHAAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Prioritas pembangunan daerah tahun 2027 pada dasarnya adalah gambaran prioritas pembangunan Kabupaten Banyumas tahun 2027 yang diambil dan dikaitkan dengan program pembangunan RPJMD Kabupaten Banyumas Tahun 2025-2029. Selain itu prioritas pembangunan merupakan program kegiatan yang mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional sebagaimana tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2027.

RKP Tahun 2027 merupakan penjabaran dari dokumen RPJMN 2025-2029. RPJMN Tahun 2025-2029 didasarkan atas Visi Misi Presiden dan Wakil Presiden terpilih Tahun 2025-2029, yaitu “Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”. Visi tersebut dijabarkan ke dalam 8 (delapan) Misi pembangunan/Asta Cita, yang dituangkan menjadi Prioritas Nasional. Prioritas Nasional tersebut antara lain:

1. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM);
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru;
3. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi;
4. Memperkuat pembangunan sumberdaya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas;
5. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri;
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan;
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan;

8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan Provinsi Jawa Tengah tahun 2025-2029 disusun pentahapan fokus kebijakan pembangunan daerah. Arah kebijakan pada tahun 2027 fokus diarahkan pada kebijakan “Meneguhkan posisi Jawa Tengah sebagai lumbung pangan nasional”. Upaya yang dilakukan dalam mewujudkan kebijakan tersebut antara lain:

1. peningkatan produksi dan produktivitas sektor pertanian, perkebunan, peternakan, pangan, kehutanan, kelautan dan perikanan;
2. penguatan infrastruktur dan pengelolaan sumber daya air yang berkelanjutan yang mendukung kontinuitas produksi pangan;
3. pengendalian dan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan;
4. penguatan sistem *agroforestry* berbasis potensi lokal;
5. pemenuhan hak dasar atas pangan yang cukup, beragam, bergizi, seimbang, dan aman secara berkelanjutan, penguatan sistem rantai pasok, dan penguatan pengendalian harga pangan untuk menjamin aksesibilitas pangan;
6. penyediaan pangan lokal secara mandiri dan berkelanjutan;
7. peningkatan ketahanan pangan dan gizi hingga tingkat individu melalui pengembangan biofortifikasi dan fortifikasi pangan secara luas (*large scale food fortification/LSFF*);
8. pencegahan pemborosan pangan (*food loss and waste*).

Pembangunan daerah Jawa Tengah tahun 2027 juga diarahkan untuk “Penguatan Landasan Pembangunan Daerah” dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran daerah dengan prioritas daerah yaitu:

1. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamis.
2. Penguatan Landasan Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif, dan Berkelanjutan.
3. Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing dan Berkarakter.

Rencana pembangunan Kabupaten Banyumas Tahun 2027 disusun untuk mendukung terwujudnya visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih yang tertuang dalam RPJMD. Adapun visi yang ditetapkan adalah: “Mewujudkan Banyumas yang Produktif, Adil, dan Sejahtera.”

Perwujudan visi tersebut dijabarkan melalui 6 (enam) misi pembangunan daerah, yaitu:

1. Meningkatkan kualitas hidup dan daya saing SDM;
2. Memperkuat ekonomi kerakyatan yang maju, mandiri, dan menyejahterakan;
3. Memperkuat ketahanan pangan;
4. Meningkatkan pengembangan wilayah dan infrastruktur yang berkelanjutan;
5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah berintegritas, adaptif, dan kolaboratif serta mendukung peningkatan daya saing daerah;
6. Meningkatkan keberlanjutan sumber daya alam dan lingkungan hidup.

Mengacu pada RPJMD Kabupaten Banyumas Tahun 2025–2029, RKPD Kabupaten Banyumas Tahun 2027 diarahkan untuk “Penyiapan penguatan Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi untuk peningkatan kualitas SDM dan ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan serta tata kelola pemerintahan yang adaptif”. Secara keseluruhan arah kebijakan pembangunan Kabupaten Banyumas Tahun 2027 diprioritaskan untuk:

- a. Meningkatkan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan yang bermutu secara inklusif;
- b. Meningkatkan budaya literasi, pengelolaan olahraga dan kebudayaan Banyumas untuk penguatan Karakter Sumber Daya Manusia yang unggul;
- c. Meningkatkan pembangunan keluarga yang memperhatikan lingkungan pendukung berbasis kearifan lokal, kesetaraan gender, pemenuhan hak dan perlindungan masyarakat secara inklusif, serta peningkatan peran aktif pemuda;
- d. Meningkatkan pengembangan SDM dan kelembagaan pelaku ekonomi;
- e. Penguatan Implementasi regulasi yang hijau dan adaptif;
- f. Meningkatkan pengembangan produk potensial dan produk unggulan serta penguatan sarana dan prasarana pendukung;
- g. Meningkatkan penanganan kemiskinan dan pelayanan perlindungan sosial secara terintegrasi;
- h. Meningkatkan kualitas dan kompetensi SDM tenaga kerja, perluasan kesempatan kerja dan kesempatan berusaha dalam rangka peningkatan pendapatan dan penurunan pengangguran;
- i. Memperkuat Ketahanan Pangan Lokal dengan peningkatan produksi dan produktivitas pangan serta pengembangan pangan lokal;

- j. Meningkatkan pemerataan pembangunan wilayah dengan infrastruktur dan konektivitas serta instrumen pendukung yang memadai dan berkelanjutan;
- k. Meningkatkan kualitas dan efektivitas penyelenggaraan pemerintah daerah serta pelayanan publik berbasis teknologi informasi mendukung Reformasi Birokrasi;
- l. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan ketahanan daerah secara berkelanjutan.

III.2. TUJUAN DAN SASARAN RENJA PERANGKAT DAERAH

Penetapan tujuan dan sasaran dilakukan untuk merespons isu-isu strategis yang telah diidentifikasi. Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Banyumas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, bertanggung jawab membantu Bupati dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perumahan dan kawasan permukiman dan pertanahan.

Rencana pembangunan disusun untuk mendukung terwujudnya visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih yang tertuang dalam RPJMD. Adapun visi yang ditetapkan adalah: ***“Mewujudkan Banyumas yang Produktif, Adil, dan Sejahtera.”*** Perwujudan visi tersebut dijabarkan melalui 6 (enam) misi pembangunan daerah, yaitu:

1. Meningkatkan kualitas hidup dan daya saing SDM;
2. Memperkuat ekonomi kerakyatan yang maju, mandiri, dan menyejahterakan;
3. Memperkuat ketahanan pangan;
4. Meningkatkan pengembangan wilayah dan infrastruktur yang berkelanjutan;
5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah berintegritas, adaptif, dan kolaboratif serta mendukung peningkatan daya saing daerah;
6. Meningkatkan keberlanjutan sumber daya alam dan lingkungan hidup.

Mengacu pada RPJMD Kabupaten Banyumas Tahun 2025–2029, RKPD Kabupaten Banyumas Tahun 2027 diarahkan untuk ***“Penyiapan penguatan Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi untuk peningkatan kualitas SDM dan ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan serta tata kelola pemerintahan yang adaptif”***.

Adapun tujuan dan sasaran dalam Renja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab. Banyumas Tahun 2027 seperti yang tertuang

dalam Rencana Strategis Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Banyumas tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 1 Tujuan dan Sasaran Dinperkim

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA
Terwujudnya kawasan permukiman yang layak, tertata, dan berkelanjutan serta penyelenggaraan administrasi pertanahan yang tertib dan akuntabel		Rasio Permukiman Layak Huni
		Rasio Rumah Layak Huni
		Indeks Tertib Administrasi Pertanahan
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja, efektivitas pengendalian dan kualitas pelayanan publik Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah
		Nilai SPIP Perangkat Daerah
		Indeks Pelayanan Publik Perangkat Daerah
	Meningkatnya permukiman layak huni	Persentase permukiman layak huni
		Persentase rata-rata kinerja penanganan kawasan permukiman
	Meningkatnya rumah layak huni bagi masyarakat	Persentase Peningkatan Rumah Layak Huni
	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan urusan pertanahan	Persentase PSU Perumahan yang bersertifikat
		Presentase pemanfaatan penggunaan tanah

III.3. PROGRAM DAN KEGIATAN

Program merupakan kumpulan kegiatan yang dilaksanakan secara sistematis dan terpadu oleh satu atau beberapa instansi pemerintah serta melalui kerja sama dengan masyarakat, guna mencapai sasaran dan tujuan tertentu. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Banyumas, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, mempunyai tugas membantu Bupati dalam perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan, pembinaan dan supervisi, evaluasi, serta pelaporan pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman serta urusan Pertanahan.

Pelaksanaan urusan tersebut mencakup Bidang Perumahan dan Pertanahan serta Bidang Kawasan Permukiman, yang didukung oleh Sekretariat. Dalam rangka mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Banyumas melaksanakan 9 (sembilan) program dan 18 (delapan belas) kegiatan yang dilaksanakan oleh dua bidang dan Sekretariat.

Rincian rumusan rencana program dan kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2027 beserta perkiraan maju Tahun 2028 disajikan pada Tabel T-C.33 berikut:

Tabel T-C.33

**Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Banyumas Tahun 2027
Dan Perkiraan Maju Tahun 2028
Kabupaten Banyumas**

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub kegiatan	Rencana Tahun 2027				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2028	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1.04.05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Presentase Drainase Lingkungan dalam kondisi baik	Kab. Banyumas	43,21	6.341.900.000,00	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		43,47	6.522.600.000
		Persentase PSU Perumahan yang diserahkan ke Pemerintah Daerah	Kab. Banyumas	50,83				54,13	
		Persentase Jalan Lingkungan Permukiman dalam Kondisi Baik	Kab. Banyumas	44,82				46,42	
		Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	Kab. Banyumas	100,00				100	
1.04.05.2.01	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Jumlah PSU Perumahan yang diserahkan	Kab. Banyumas	10,00	6.341.900.000,00	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		10	6.522.600.000
		Jumlah Panjang Jalan Lingkungan yang Ditangani	Kab. Banyumas	6,35				6,35	
		Panjang Drainase yang dibangun ditingkatkan dan dipelihara	Kab. Banyumas	2.055,00				2055	
		Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	Kab. Banyumas	100,00				100	
1.04.05.2.01.0001	Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	Kab. Banyumas	10,00	40.000.000,00	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		10	40.000.000
1.04.05.2.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	Kab. Banyumas	2,00	75.000.000,00	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		2	80.000.000
1.04.05.2.01.0010	Verifikasi dan Penyerahan PSU Perumahan dari Pengembang	Jumlah Laporan Hasil Serah Terima PSU Perumahan yang Terverifikasi dari Pengembang	Kab. Banyumas	10,00	75.000.000,00	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		10	80.000.000
1.04.05.2.01.0012	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum	Kab. Banyumas	80,00	6.151.900.000,00	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		80	6.322.600.000

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub kegiatan	Rencana Tahun 2027				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2028	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1.04.03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kab yang ditangani	Kab. Banyumas	38,77	1.341.600.000,00			58,16	1.379.800.000
1.04.03.2.02	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Jumlah luas kawasan kumuh (siswa kumuh)	Kab. Banyumas	31,58	15.000.000,00			21,58	15.000.000
1.04.03.2.02.0015	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni Serta Kesadaran Hukum Tentang Kepemilikan Rumah	Jumlah Rumah Tangga yang Terfasilitasi Peningkatan Kesadaran dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Kab. Banyumas	50,00	15.000.000,00	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		50	15.000.000
1.04.03.2.03	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Jumlah luas kawasan kumuh (siswa kumuh)	Kab. Banyumas	31,58	1.326.600.000,00			21,58	1.364.800.000
1.04.03.2.03.0007	Pendataan dan Verifikasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Kumuh	Jumlah Dokumen Data Permukiman Kumuh yang Terverifikasi	Kab. Banyumas	2,00	200.000.000,00	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		1	100.000.000
1.04.03.2.03.0013	Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh	Luas Permukiman Kumuh yang Dipugar	Kab. Banyumas	15,00	1.126.600.000,00	endapatan Asli Daerah (PAD)		15	1.264.800.000
2.10.06	PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE	Persentase tanah yang terfasilitasi redistribusi	Kab. Banyumas	100,00	102.000.000,00			100	104.900.000
		Tersedianya Tanah Obyek Landreform (TOL) yang siap didistribusikan yang berasal dari Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	Kab. Banyumas	100,00				100	
2.10.06.2.01	Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah lokasi objek redistribusi tanah	Kab. Banyumas	1,00	102.000.000,00			1	104.900.000
2.10.06.2.01.0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam Pemanfaatan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam	Kab. Banyumas	1,00	102.000.000,00	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		1	104.900.000

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub kegiatan	Rencana Tahun 2027				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2028	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
	Redistribusi Tanah dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Pemanfaatan Redistribusi Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota							
2.10.10	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	Persentase bidang tanah yang dikonsolidasikan	Kab. Banyumas	100,00	400.000.000,00			100	400.000.000
		Persentase bidang tanah perumahan yang disertifikatkan	Kab. Banyumas	100,00				100	
		Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan	Kab. Banyumas	100,00				100	
		Persentase Penetapan Tanah Untuk Pembangunan Fasilitas Umum	Kab. Banyumas	100,00				100	
		Tersedianya Lokasi Pembangunan Dalam Rangka Penanaman Modal	Kab. Banyumas	100,00				100	
2.10.10.2.01	Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah bidang tanah PSU Perumahan yang disertifikatkan	Kab. Banyumas	20,00	400.000.000,00			20	400.000.000
		Jumlah Bidang Tanah yang dikonsolidasi tahun n	Kab. Banyumas	100,00				50	
2.10.10.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Kab. Banyumas	1,00	150.000.000,00	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		1	150.000.000
2.10.10.2.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Banyumas	1,00	250.000.000,00	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		1	250.000.000
2.10.09	PROGRAM PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH	Tersedianya tanah untuk masyarakat	Kab. Banyumas	100,00	102.000.000,00			100	104.000.000
2.10.09.2.01	Penerbitan Izin Membuka Tanah	Jumlah kegiatan ijin membuka tanah	Kab. Banyumas	1,00	102.000.000,00			1	104.000.000
2.10.09.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Izin Membuka Tanah	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Pemberian Izin Membuka Tanah	Kab. Banyumas	1,00	102.000.000,00	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		1	104.000.000
2.10.04	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	Penanganan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi	Kab. Banyumas	100,00	102.000.000,00			100	104.000.000

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub kegiatan	Rencana Tahun 2027				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2028	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
2.10.04.2.01	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Banyumas	1,00	102.000.000,00			1	104.000.000
2.10.04.2.01.0005	Inventarisasi Kasus Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data Kasus Pertanahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Banyumas	1,00	102.000.000,00	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		1	104.000.000
		Persentase Peningkatan Rumah Layak Huni	Kab. Banyumas	0,66					
1.04.04	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Persentase Cakupan Rumah Layak Huni	Kab. Banyumas	86,22	14.284.200.000,00			86,8	14.691.200.000
		Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	Kab. Banyumas	13,78				13,2	
1.04.04.2.01	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah RTLH yang Ditangani sampai dengan Tahun n	Kab. Banyumas	30,70	14.284.200.000,00			32,652	14.691.200.000
1.04.04.2.01.0001	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki	Kab. Banyumas	1.800,00	14.284.200.000,00	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		1950	14.691.200.000
1.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase tersedianya rumah layak huni bagi korban bencana	Kab. Banyumas	100,00	4.943.300.000,00			100	5.084.100.000
		Persentase tersedianya rumah layak huni bagi warga terdampak relokasi akibat program pemerintah	Kab. Banyumas	100,00				100	
1.04.02.2.01	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten	Kab. Banyumas	6,00	2.400.000.000,00			6	2.500.000.000
1.04.02.2.01.0002	Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Kab. Banyumas	1,00	500.000.000,00	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		1	500.000.000
1.04.02.2.01.0006	Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus	Jumlah Dokumen Data Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun, dan Rumah Khusus	Kab. Banyumas	1,00	300.000.000,00	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		1	300.000.000

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub kegiatan	Rencana Tahun 2027				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2028	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1.04.02.2.01.0007	Identifikasi Perumahan di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Kab. Banyumas	1,00	550.000.000,00	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		1	550.000.000
1.04.02.2.01.0008	Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Bakal Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/ Kota yang Terverifikasi	Kab. Banyumas	1,00	150.000.000,00	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		1	200.000.000
1.04.02.2.01.0009	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Kab. Banyumas	1,00	550.000.000,00	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		1	550.000.000
1.04.02.2.01.0010	Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Bakal Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terverifikasi	Kab. Banyumas	1,00	350.000.000,00	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		1	400.000.000
1.04.02.2.02	Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Kab. Banyumas	2,00	443.300.000,00			2	484.100.000
1.04.02.2.02.0001	Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana	Jumlah Orang/Sukarelawan yang Mengikuti Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota	Kab. Banyumas	47,00	243.300.000,00	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		47	284.100.000
1.04.02.2.02.0004	Pembentukan dan Pelatihan Tim Satgas, Tim Pendamping dan Fasilitator	Jumlah Orang pada Tim Satgas, Tim Pendamping, dan Fasilitator yang Terbentuk dan Terlatih	Kab. Banyumas	6,00	200.000.000,00	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		6	200.000.000
1.04.02.2.03	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	Kab. Banyumas	55,00	1.900.000.000,00			55	1.900.000.000
1.04.02.2.03.0001	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi	Kab. Banyumas	15,00	300.000.000,00	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		15	300.000.000
1.04.02.2.03.0004	Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terbangun	Kab. Banyumas	10,00	800.000.000,00	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		10	800.000.000
		Bantuan akses rumah sewa layak huni bagi korban bencana	Kab. Banyumas	10,00				10	
		Pemukiman kembali bagi korban bencana	Kab. Banyumas	10,00				10	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub kegiatan	Rencana Tahun 2027				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2028	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1.04.02.2.03.0009	Pembangunan Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Kabupaten/Kota	Kab. Banyumas	20,00	800.000.000,00	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		20	800.000.000
		Bantuan akses Rumah Sewa Layak Huni	Kab. Banyumas	20,00				20	
		Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten	Kab. Banyumas	100,00				100	
1.04.02.2.04	Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan serah terima rumah terdampak bencana dan relokasi akibat program pemerintah	Kab. Banyumas	1,00	200.000.000,00			1	200.000.000
1.04.02.2.04.0004	Penatausahaan Serah Terima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Serah Terima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Kab. Banyumas	1,00	100.000.000,00	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		1	100.000.000
1.04.02.2.04.0005	Penatausahaan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Kab. Banyumas	1,00	100.000.000,00	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		1	100.000.000
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	IKM Perangkat Daerah	Kab. Banyumas	95,00	10.198.000.000,00	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		95	10.488.600.000
		Persentase Realisasi APBD Perangkat Daerah	Kab. Banyumas	95,00				95	
		Persentase IP ASN Pegawai pada Perangkat Daerah bernilai sedang - sangat tinggi	Kab. Banyumas	76,00				76,5	
		Nilai kematangan organisasi	Kab. Banyumas	49,00				49	
		Persentase Pemenuhan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Banyumas	100,00				100	
X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Kesesuaian Program Renja Perangkat Daerah dengan Renstra Perangkat Daerah	Kab. Banyumas	100,00	190.000.000,00			100	190.000.000
		Persentase kesesuaian Program Renja Perangkat Daerah dengan DPA	Kab. Banyumas	100,00				100	
X.XX.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Banyumas	4,00	50.000.000,00	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		4	50.000.000
X.XX.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.	Kab. Banyumas	3,00	140.000.000,00	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		3	140.000.000

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub kegiatan	Rencana Tahun 2027				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2028	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Banyumas	100,00	689.896.638,00			100	789.896.638
		Nilai pengelolaan arsip perangkat daerah	Kab. Banyumas	70,00				75	
X.XX.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kab. Banyumas	1,00	17.000.000,00	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		1	17.000.000
X.XX.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kab. Banyumas	1,00	239.744.138,00	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		1	239.744.138
X.XX.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kab. Banyumas	1,00	23.152.500,00	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		1	23.152.500
X.XX.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Banyumas	72,00	400.000.000,00	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		72	490.000.000
X.XX.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kab. Banyumas	3.000,00	10.000.000,00	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		3000	20.000.000
X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase kesesuaian realisasi pengadaan BMD dengan rencana kebutuhan pengadaan barang miik daerah (RKBMD)	Kab. Banyumas	100,00	370.000.000,00			100	220.000.000
X.XX.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Kab. Banyumas	1,00	70.000.000,00	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		1	120.000.000
X.XX.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kab. Banyumas	1,00	90.000.000,00	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		1	90.000.000
X.XX.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kab. Banyumas	1,00	210.000.000,00	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		1	10.000.000
X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Banyumas	100,00	2.048.488.838,00			100	2.048.488.838
X.XX.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kab. Banyumas	48,00	181.770.278,00	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		48	181.770.278
X.XX.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kab. Banyumas	12,00	1.866.718.560,00	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		12	1.866.718.560

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub kegiatan	Rencana Tahun 2027				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2028	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik	Kab. Banyumas	100,00	517.164.810,00			100	617.164.810
		Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Banyumas	100,00				100	
X.XX.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kab. Banyumas	34,00	187.164.810,00	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		34	287.164.810
X.XX.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Kab. Banyumas	150,00	30.000.000,00	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		150	30.000.000
X.XX.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kab. Banyumas	140,00	100.000.000,00	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		140	100.000.000
X.XX.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kab. Banyumas	2,00	200.000.000,00	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		2	200.000.000
X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Banyumas	100,00	6.382.449.714,00			100	6.623.049.714
		Persentase ketepatan waktu pertanggungjawaban anggaran (SPJ) terhadap pengajuan anggaran (NPD)	Kab. Banyumas	100,00				100	
X.XX.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Banyumas	48,00	6.086.701.514,00	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		48	6.327.301.514
X.XX.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab. Banyumas	24,00	295.748.200,00	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		24	295.748.200

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Banyumas tahun 2027 ditunjukkan pada lampiran matrik Renja yang telah disesuaikan dengan Rencana Strategis Tahun 2025-2029 sebagai berikut:

RENCANA KERJA AWAL ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD) DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KABUPATEN BANYUMAS
TAHUN 2027

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2025	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		
											NASIONAL	DAERAH	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1.04.05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Presentase Drainase Lingkungan dalam kondisi baik	43,73		43,21	43,21	6.341.900.000,00	Kab. Banyumas	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			
			Persentase PSU Perumahan yang diserahkan ke Pemerintah Daerah	57,43		47,52	50,83						
			Persentase Jalan Lingkungan Permukiman dalam Kondisi Baik	48,03		43,21	44,82						
			Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	100		100	100,00						
	1.04.05.2.01	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Jumlah PSU Perumahan yang diserahkan	10		10	10,00	6.341.900.000,00	Kab. Banyumas	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			
Jumlah Panjang Jalan Lingkungan yang Ditangani			6,35		6,35	6,35							
Panjang Drainase yang dibangun ditingkatkan dan dipelihara			2055		2055	2.055,00							
Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)			100		100	100,00							
	1.04.05.2.01 .0001	Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	10		10	10,00	40.000.000,00	Kab. Banyumas	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan		Masyarakat Kabupaten Banyumas
	1.04.05.2.01 .0003	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	2		2	2,00	75.000.000,00	Kab. Banyumas				
	1.04.05.2.01 .0010	Verifikasi dan Penyerahan PSU Perumahan dari Pengembang	Jumlah Laporan Hasil Serah Terima PSU Perumahan yang Terverifikasi dari Pengembang	10		10	10,00	75.000.000,00	Kab. Banyumas				
	1.04.05.2.01 .0012	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum	80		80	80,00	6.151.900.000,00	Kab. Banyumas				
2	1.04.03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kab yang ditangani	77,55		19,39	38,77	1.341.600.000,00	Kab. Banyumas	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			
	1.04.03.2.02	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Jumlah luas kawasan kumuh (sisa kumuh)	11,58		41,58	31,58	15.000.000,00	Kab. Banyumas	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			
	1.04.03.2.02 .0015	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni Serta Kesadaran Hukum	Jumlah Rumah Tangga yang Terfasilitasi Peningkatan Kesadaran dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran	50		50	50,00	15.000.000,00	Kab. Banyumas	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2025	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		
											NASIONAL	DAERAH	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Tentang Kepemilikan Rumah	Hukum tentang Kepemilikan Rumah								ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.		
	1.04.03.2.03	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Jumlah luas kawasan kumuh (sisa kumuh)	11,58		41,58	31,58	1.326.600.000,00	Kab. Banyumas	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			
	1.04.03.2.03.0007	Pendataan dan Verifikasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Kumuh	Jumlah Dokumen Data Permukiman Kumuh yang Terverifikasi	1		3	2,00	200.000.000,00	Kab. Banyumas	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.		
	1.04.03.2.03.0013	Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh	Luas Permukiman Kumuh yang Dipugar	15		15	15,00	1.126.600.000,00	Kab. Banyumas	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			
3	2.10.06	PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE	Persentase tanah yang terfasilitasi redistribusi	100		100	100,00	102.000.000,00	Kab. Banyumas	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			
			Tersedianya Tanah Obyek Landreform (TOL) yang siap didistribusikan yang berasal dari Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	100		100	100,00						
	2.10.06.2.01	Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah lokasi objek redistribusi tanah	1		1	1,00	102.000.000,00	Kab. Banyumas	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			
	2.10.06.2.01.0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	1		1	1,00	102.000.000,00	Kab. Banyumas	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.		
4	2.10.10	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	Persentase bidang tanah yang dikonsolidasikan	100		100	100,00	400.000.000,00	Kab. Banyumas	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			
			Persentase bidang tanah perumahan yang disertifikatkan	100		100	100,00						
			Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan	100		100	100,00						

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2025	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		
											NASIONAL	DAERAH	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Persentase Penetapan Tanah Untuk Pembangunan Fasilitas Umum	100		100	100,00						
			Tersedianya Lokasi Pembangunan Dalam Rangka Penanaman Modal	100		100	100,00						
	2.10.10.2.01	Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah bidang tanah PSU Perumahan yang disertifikatkan	20		20	20,00	400.000.000,00	Kab. Banyumas	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			
			Jumlah Bidang Tanah yang dikonsolidasi tahun n	50		100	100,00						
	2.10.10.2.01 .0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/ Kota	1		1	1,00	150.000.000,00	Kab. Banyumas	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.		
	2.10.10.2.01 .0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota	1		1	1,00	250.000.000,00					
5	2.10.09	PROGRAM PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH	Tersedianya tanah untuk masyarakat	100		100	100,00	102.000.000,00	Kab. Banyumas	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			
	2.10.09.2.01	Penerbitan Izin Membuka Tanah	Jumlah kegiatan ijin membuka tanah	1		1	1,00	102.000.000,00	Kab. Banyumas	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			
	2.10.09.2.01 .0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Izin Membuka Tanah	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Pemberian Izin Membuka Tanah	1		1	1,00	102.000.000,00	Kab. Banyumas	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.		
6	2.10.04	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	Penanganan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi	100		100	100,00	102.000.000,00	Kab. Banyumas	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			
	2.10.04.2.01	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	1		1	1,00	102.000.000,00	Kab. Banyumas	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			
	2.10.04.2.01 .0005	Inventarisasi Kasus Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data Kasus Pertanahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1		1	1,00	102.000.000,00	Kab. Banyumas	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.		
7	1.04.04		Persentase Cakupan Rumah Layak Huni	87,4		85,65	86,22	14.284.200.000,00	Kab. Banyumas	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2025	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		
											NASIONAL	DAERAH	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	12,6		14,35	13,78		Kab. Banyumas	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			
	1.04.04.2.01	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah RTLH yang Ditangani sampai dengan Tahun n	34,752		28,902	30,70	14.284.200.000,00	Kab. Banyumas	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			
	1.04.04.2.01 .0001	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki	2100		1650	1.800,00	14.284.200.000,00	Kab. Banyumas	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.		
8	1.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase tersedianya rumah layak huni bagi korban bencana	100		100	100,00	4.943.300.000,00	Kab. Banyumas	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			
			Persentase tersedianya rumah layak huni bagi warga terdampak relokasi akibat program pemerintah	100		100	100,00		Kab. Banyumas	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			
	1.04.02.2.01	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten	6		6	6,00	2.400.000.000,00	Kab. Banyumas	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			
	1.04.02.2.01 .0002	Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/ Kota	1		1	1,00	500.000.000,00	Kab. Banyumas	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.		
	1.04.02.2.01 .0006	Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus	Jumlah Dokumen Data Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun, dan Rumah Khusus	1		1	1,00	300.000.000,00	Kab. Banyumas	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			
	1.04.02.2.01 .0007	Identifikasi Perumahan di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/ Kota	1		1	1,00	550.000.000,00	Kab. Banyumas	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			
	1.04.02.2.01 .0008	Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Data Bakal Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/ Kota yang Terverifikasi	1		1	1,00	150.000.000,00	Kab. Banyumas	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			
	1.04.02.2.01 .0009	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/ Kota	1		1	1,00	550.000.000,00	Kab. Banyumas	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			
	1.04.02.2.01 .0010	Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Data Bakal Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/ Kota yang Terverifikasi	1		1	1,00	350.000.000,00	Kab. Banyumas	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			
	1.04.02.2.02	Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan	Jumlah Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi	2		2	2,00	443.300.000,00	Kab. Banyumas	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2025	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		
											NASIONAL	DAERAH	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota										
	1.04.02.2.02 .0001	Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana	Jumlah Orang/Sukarelawan yang Mengikuti Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota	47		47	47,00	243.300.000,00	Kab. Banyumas	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi,		
	1.04.02.2.02 .0004	Pembentukan dan Pelatihan Tim Satgas, Tim Pendamping dan Fasilitator	Jumlah Orang pada Tim Satgas, Tim Pendamping, dan Fasilitator yang Terbentuk dan Terlatih	6		6	6,00	200.000.000,00	Kab. Banyumas	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.		
	1.04.02.2.03	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	55		55	55,00	1.900.000.000,00	Kab. Banyumas	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			
	1.04.02.2.03 .0001	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi	15		15	15,00	300.000.000,00	Kab. Banyumas	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.		
	1.04.02.2.03 .0004	Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terbangun	10		10	10,00	800.000.000,00	Kab. Banyumas	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			
			Bantuan akses rumah sewa layak huni bagi korban bencana	10		10	10,00						
			Pemukiman kembali bagi korban bencana	10		10	10,00						
	1.04.02.2.03 .0009	Pembangunan Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Kabupaten/Kota	20		20	20,00	800.000.000,00	Kab. Banyumas	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			
			Bantuan akses Rumah Sewa Layak Huni	20		20	20,00						
			Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten	100		100	100,00						
	1.04.02.2.04	Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan serah terima rumah terdampak bencana dan relokasi akibat program pemerintah	1		1	1,00	200.000.000,00	Kab. Banyumas	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			
	1.04.02.2.04 .0004	Penatausahaan Serah Terima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Serah Terima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	1		1	1,00	100.000.000,00	Kab. Banyumas	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi,		
	1.04.02.2.04 .0005	Penatausahaan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	1		1	1,00	100.000.000,00	Kab. Banyumas	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	pemerataan ekonomi dan		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2025	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		
											NASIONAL	DAERAH	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
											pemberantasan kemiskinan.		
9	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	IKM Perangkat Daerah	95		95	95,00	10.198.000.000,00	Kab. Banyumas	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			
			Persentase Realisasi APBD Perangkat Daerah	95		95	95,00		Kab. Banyumas	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			
			Persentase IP ASN Pegawai pada Perangkat Daerah bernilai sedang - sangat tinggi	77		75,5	76,00		Kab. Banyumas	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			
			Nilai kematangan organisasi	49		49	49,00		Kab. Banyumas	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			
			Persentase Pemenuhan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100		100	100,00		Kab. Banyumas	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			
	X.XX.01.2.0 1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Kesesuaian Program Renja Perangkat Daerah dengan Renstra Perangkat Daerah	100		100	100,00	190.000.000,00	Kab. Banyumas	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			
Persentase kesesuaian Program Renja Perangkat Daerah dengan DPA			100		100	100,00	Kab. Banyumas		Pendapatan Asli Daerah (PAD)				
	X.XX.01.2.0 1.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4		4	4,00	50.000.000,00	Kab. Banyumas	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.		
	X.XX.01.2.0 1.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.	3		3	3,00	140.000.000,00	Kab. Banyumas	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			
	X.XX.01.2.0 6	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100		100	100,00	689.896.638,00	Kab. Banyumas	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			
			Nilai pengelolaan arsip perangkat daerah	80		65	70,00		Kab. Banyumas	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			
	X.XX.01.2.0 6.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Peneranga n Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1		1	1,00	17.000.000,00	Kab. Banyumas	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.		
	X.XX.01.2.0 6.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1		1	1,00	239.744.138,00	Kab. Banyumas	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			
	X.XX.01.2.0 6.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1		1	1,00	23.152.500,00	Kab. Banyumas	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			
	X.XX.01.2.0 6.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	72		72	72,00	400.000.000,00	Kab. Banyumas	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			
	X.XX.01.2.0 6.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	3000		3000	3.000,00	10.000.000,00	Kab. Banyumas	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			
	X.XX.01.2.0 7	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase kesesuaian realisasi pengadaan BMD dengan rencana kebutuhan pengadaan barang miik daerah (RKBMD)	100		100	100,00	370.000.000,00	Kab. Banyumas	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2025	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		
											NASIONAL	DAERAH	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	X.XX.01.2.0 7.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1		1	1,00	70.000.000,00	Kab. Banyumas	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.		
	X.XX.01.2.0 7.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1		1	1,00	90.000.000,00	Kab. Banyumas	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			
	X.XX.01.2.0 7.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1		1	1,00	210.000.000,00	Kab. Banyumas	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			
	X.XX.01.2.0 8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100		100	100,00	2.048.488.838,00	Kab. Banyumas	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			
	X.XX.01.2.0 8.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	48		48	48,00	181.770.278,00	Kab. Banyumas	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.		
	X.XX.01.2.0 8.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12		12	12,00	1.866.718.560,00	Kab. Banyumas	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			
	X.XX.01.2.0 9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik	100		100	100,00	517.164.810,00	Kab. Banyumas	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			
			Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Urusan Pemerintahan Daerah	100		100	100,00		Kab. Banyumas	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			
	X.XX.01.2.0 9.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	34		34	34,00	187.164.810,00	Kab. Banyumas	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.		
	X.XX.01.2.0 9.0005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	150		150	150,00	30.000.000,00	Kab. Banyumas	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			
	X.XX.01.2.0 9.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	140		140	140,00	100.000.000,00	Kab. Banyumas	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			
	X.XX.01.2.0 9.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2		2	2,00	200.000.000,00	Kab. Banyumas	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			
	X.XX.01.2.0 2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100		100	100,00	6.382.449.714,00	Kab. Banyumas	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			
			Persentase ketepatan waktu pertanggungjawaban anggaran (SPJ) terhadap pengajuan anggaran (NPD)	100		100	100,00		Kab. Banyumas	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			
	X.XX.01.2.0 2.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	48		48	48,00	6.086.701.514,00	Kab. Banyumas	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Membangun dari desa dan		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2025	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		
											NASIONAL	DAERAH	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	X.XX.01.2.0 2.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	24		24	24,00	295.748.200,00	Kab. Banyumas	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.		

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Banyumas Tahun 2027 memuat Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan, indikator kinerja, lokasi dan kelompok sasaran serta pagu indikatif dan perkiraan maju yang akan menjadi acuan dalam rangka menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Banyumas Tahun 2027. Dokumen Renja adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Dokumen Rencana Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Banyumas Tahun 2027 menjadi pedoman untuk menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), yang dijabarkan ke dalam Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2027, Adapun kaidah pelaksanaannya sebagai berikut:

1. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Banyumas dan seluruh *stakeholders* pembangunan termasuk masyarakat luas dan dunia usaha, berkewajiban dan berperan serta untuk melaksanakan program-program Rencana Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Banyumas Tahun 2027 dengan sebaik-baiknya;
2. Sebagai pedoman penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas tahun 2027, Rencana Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Banyumas Tahun 2027 ini juga disusun dengan mengikuti pendekatan baru dalam penganggaran, sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara sebagaimana telah diubah dengan Perppu Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan.

Pada akhirnya keberhasilan pembangunan di Kabupaten Banyumas selain dilaksanakan oleh jajaran Pemerintah Kabupaten Banyumas juga ditentukan oleh dukungan masyarakat untuk menjawab tantangan dan mengurangi permasalahan

dalam mewujudkan visi dan misi yang tertuang dalam dokumen perencanaan agar dapat terwujud sesuai waktu yang telah ditentukan.

Purwokerto, Januari 2026

Kepala Dinas Perumahan
dan Kawasan Permukiman
Kabupaten Banyumas



Sakty Suprabowo, S.T.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP 196911231997031001